

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JERMAN DARI ERA
KANSELIR ANGELA MERKEL KE KANSELIR OLAF SCHOLZ**

(Skripsi)

Oleh

**ASTRITIA LATIFA
NPM 2216071070**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JERMAN DARI ERA KANSELIR ANGELA MERKEL KE KANSELIR OLAF SCHOLZ

Oleh

ASTRITIA LATIFA

Ketika terjadi invasi Rusia ke Ukraina melalui aneksasi atas Krimea tahun 2014, Kanselir Angela Merkel membentuk kebijakan pertahanan secara bertahap dengan terkoordinasi melalui Uni Eropa dan NATO dalam menekan Rusia kembali ke jalur hukum internasional memegang prinsip kerja sama damai. Namun, kebijakan pertahanan tersebut berubah saat invasi kedua berskala besar tahun 2022 yang menyebabkan perang hingga saat ini. Kanselir berikutnya, Olaf Scholz memperkenalkan istilah *Zeitenwende* pada pidatonya di parlemen, mengumumkan pembentukan dana khusus pertahanan, mendukung Ukraina dengan memasok senjata, serta memenuhi komitmen NATO.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan perubahan kebijakan pertahanan Jerman dari era Kanselir Angela Merkel ke Kanselir Olaf Scholz yang berfokus pada tahun 2014–2024. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari sumber sekunder yang relevan, seperti dokumen resmi pemerintah Jerman, laman resmi pemerintah, dan laporan lembaga internasional. Data tersebut dianalisis melalui kondensasi, penyajian data, dan verifikasi data untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan perubahan kebijakan pertahanan Jerman dipicu oleh guncangan eksternal, yaitu perang Rusia-Ukraina dengan arah (*deterrence*, kesiapan tempur, dan pertahanan kolektif), bentuk (dana khusus €100 miliar, alokasi 2% PDB untuk pertahanan, dan bantuan militer ke Ukraina), serta implementasi (kenaikan anggaran, pengadaan dan modernisasi alutsista, pengiriman senjata ke Ukraina, serta penguatan pasukan di Eropa Timur) ditentukan oleh keputusan Olaf Scholz. Tingkat perubahan kebijakan pertahanan Jerman berada pada perubahan program dan tujuan dari penolakan bantuan militer menjadi negara pengirim senjata terbesar kepada Ukraina dengan kebijakan yang mendukung pertahanan Ukraina dan penguatan keamanan Eropa.

Kata Kunci: Angela Merkel, Jerman, Kebijakan Pertahanan, Olaf Scholz, *Zeitenwende*

ABSTRACT

CHANGES IN GERMAN DEFENSE POLICY FROM CHANCELLOR ANGELA MERKEL TO CHANCELLOR OLAF SCHOLZ

By

ASTRITIA LATIFA

When Russia invaded Ukraine through the annexation of Crimea in 2014, Chancellor Angela Merkel shaped Germany's defense policy gradually through EU-NATO coordination, seeking to pressure Russia back to international law while maintaining peaceful cooperation. However, the policy changed after Russia's second, full-scale invasion in 2022, which escalated the war. Chancellor Olaf Scholz introduced *Zeitenwende* in his parliamentary speech, announced a special defense fund, supported Ukraine by supplying weapons, and reaffirmed Germany's NATO commitments. This research uses a qualitative method with a descriptive approach to explain changes in Germany's defense policy from Chancellor Angela Merkel to Chancellor Olaf Scholz, focusing on the period 2014–2024. Data were collected through a literature study using secondary sources, including official German government documents, government websites, and reports from international institutions. The data were analyzed through condensation, data display, and data verification to draw conclusions. The findings show that Germany's defense policy change was triggered by an external shocks, specifically the Russia-Ukraine war, in terms of direction (deterrence, warfighting capability, and collective defense), form (a special €100 billion fund, a 2% GDP allocation for defense, and the military aid to Ukraine), and implementation (budget increases, procurement and modernization of defense equipment, supply weapons to Ukraine, and the reinforcement of troops in Eastern Europe) determined by Olaf Scholz's decisions. The change can be categorized at the program and goal levels, from refusing military aid to becoming one of the largest arms suppliers to Ukraine, while supporting Ukraine's defense and European security.

Keywords: Angela Merkel, Defense Policy, Germany, Olaf Scholz, *Zeitenwende*

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JERMAN DARI ERA
KANSELIR ANGELA MERKEL KE KANSELIR OLAF SCHOLZ**

Oleh

ASTRITIA LATIFA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN
JERMAN DARI ERA KANSELIR ANGELA
MERKEL KE KANSELIR OLAF SCHOLZ

Nama Mahasiswa : *Astritia Latifa*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216071070

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Hasbi Sidik
Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP. 197912302014041001

Khairunnisa Simbolon
Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIP. 199209262024092001

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Simon Sumanjoyo H.
Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.
NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**Penguji Utama : **Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.****2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik****Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si.**

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **8 Juni 2026**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 8 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Astritia Latifa

NPM. 2216071070

RIWAYAT HIDUP



Astritia Latifa nama lengkap penulis yang lahir pada bulan Juni di Sekayu, sebuah kabupaten yang termasuk pada wilayah Sumatera Selatan. Penulis anak ketiga dari pasangan Bapak Sutikno dan Ibu Nurlailawati. Sejak kecil, penulis menempuh pendidikan formal di TK Negeri Pembina Sekayu, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Islamiyah Sekayu. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Sekayu dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan diterima sebagai mahasiswa program studi S-1 Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama menjalani masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik dalam upaya meningkatkan kapasitas diri. Penulis tergabung dalam UKM PIK Raya Unila sebagai anggota divisi Pembimbing Sebaya dan Konselor Sebaya (PSKS) yang aktif berpartisipasi dalam kunjungan sosial tahun 2023–2024. Selain itu, penulis dipercaya menjadi *Liasion Officer* (LO) mendampingi dosen dalam kegiatan SELA VENNAS AIHII dan mendampingi mahasiswa peserta PNMHII tahun 2024. Penulis turut terlibat dalam penulisan jurnal bersama dosen yang berjudul “Perbandingan Gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Malaysia dan Indonesia sebagai Perlawanan terhadap Agresi Israel di Palestina” tahun 2025 yang terakreditasi Sinta 4. Penulis juga aktif sebagai tim media sosial jurusan dan mengikuti kegiatan di luar kampus menjadi relawan komunitas Sahabat Difabel Lampung (Sadila).

MOTTO

“Sesungguhnya Tuhanku Bersamu, Dia akan memberi petunjuk kepadaku”

QS. Asy-Syuara : 62

“Be ready, even when you don't know what you're getting ready for”

“Selalu berbuat baik dan tulus membantu sesama karena mungkin keberkahan hidup, kesuksesan, dan kelancaran rezeki yang didapatkan atas doa mereka”

PERSEMBAHAN

Untuk Papa, Mama, Keluarga Tercinta, Orang-orang terkasih yang selalu memberi dukungan moral dalam setiap langkah penulis, dan para pembaca yang telah meluangkan waktu memahami skripsi ini.

SANWACANA

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, serta petunjuknya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Perubahan Kebijakan Pertahanan Jerman dari Era Kanselir Angela Merkel ke Kanselir Olaf Scholz” dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dari jurusan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat arahan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N, M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional. Kehadiran dan kepemimpinan Bapak menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik yang telah penulis lalui.
3. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan selama proses demi kesempurnaan skripsi ini. Sejak awal perkuliahan, Mas Tyo telah menjadi salah satu sosok yang menginspirasi penulis untuk mencintai proses belajar dan menaruh perhatian pada isu-isu keamanan. Penulis akan selalu ingat pesan Mas Tyo bahwa “*lifelong learning*”, belajar sepanjang hayat tanpa mengenal batas usia guna memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kualitas diri.
4. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia meluangkan banyak waktu untuk membimbing sejak awal proses penulisan skripsi. Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada abang sebagai tempat penulis bertanya, berdiskusi, dan menemukan arah ditengah berbagai kebingungan dan hambatan yang dirasakan selama proses penulisan. Setiap arahan, masukan, serta nasihat yang diberikan tidak

hanya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga menjadi bekal berharga dalam menghadapi kehidupan setelah dunia perkuliahan.

5. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah mendorong penulis untuk berani maju menjalani proses hingga tahap akhir skripsi. Setiap diskusi, arahan, dan nasihat yang diberikan telah menjadi penguat di saat penulis merasa ragu terhadap kemampuan diri sendiri.
6. Seluruh dosen Jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, pelajaran hidup, hingga bantuan dalam proses akademik penulis sejak awal perkuliahan. Secara khusus, terima kasih kepada Mba Tiwi atas dukungan moral agar penulis segera menyelesaikan skripsi, kesempatan yang diberikan untuk mengembangkan potensi diri dalam penulisan jurnal, serta kebersamaan dalam tim media jurusan. Kepada seluruh staf jurusan HI, penulis juga menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kesediaannya dalam membantu berbagai urusan administrasi selama penulis menjalani perkuliahan. Kebaikan kecil yang diberikan telah menjadi kemudahan besar dalam perjalanan akademik penulis.
7. Papa tersayang dengan segala perjuangan yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi selalu dapat penulis rasakan. Terima kasih karena telah menjadi tempat pulang yang penuh pengertian, tidak pernah memaksa penulis untuk berlari secepat orang lain, dan mengajarkan bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Dukungan moral dan finansial yang Papa berikan menjadi salah satu alasan terbesar penulis mampu sampai di titik ini.
8. Mama tercinta yang tidak pernah lelah menjadi pelabuhan bagi segala cerita, keluh kesah, dan air mata penulis. Terima kasih atas doa-doa yang selalu menyertai setiap langkah bahkan ketika penulis tidak mampu mengungkapkan apa yang sedang dirasakan. Kasih sayang Mama merupakan kekuatan yang senantiasa menjaga penulis tetap berdiri tegap hingga hari ini.

9. Ayuk, Kakak, Adik yang selalu menjadi sumber penghibur penulis ketika jenuh mengerjakan skripsi. Terima kasih telah hadir menjadi penyemangat dan mendoakan kesuksesan bagi penulis. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh warna.
10. Bapak, Ibu, dan Keisya sebagai rumah kedua penulis di Lampung. Terima kasih telah hadir kebersamai penulis dengan dukungan moral dan doa tulus. Terima kasih terkhusus Bapak dan Ibu atas segala perhatian yang diberikan mengenai kebutuhan dan kondisi penulis selama menjalani proses penyusunan skripsi.
11. Aisyah genk, sebagai teman pertama sekaligus keluarga pertama penulis di Perantauan. Terima kasih kepada Dila, Dea, Lia, Fani, Zakiya, Vira, Maya, dan telah hadir dalam berbagai cerita, suka maupun duka, dan menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju penyelesaian skripsi ini. Terkhusus Dila, terima kasih telah menjadi tempat tempat bersandar saat penulis merasa rapuh, menjadi sosok yang hadir saat penulis sakit, dan menjadi teman yang tidak pernah lelah memberikan dukungan moral.
12. Ayu dan Dinda (dua serangkai), teman penulis selama menjalani perkuliahan. Terima kasih selalu menjadi pengingat penulis, memberi informasi, dan membantu penulis menyiapkan berkas penting dalam proses skripsi. Terima kasih telah hadir sebagai wujud nyata teman yang tulus dengan kepedulian dan keinginan tumbuh bersama tanpa merasa bersaing satu sama lain.
13. Alike dan Afni, teman bimbingan penulis. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dalam proses bimbingan. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan kebahagiaan yang selalu dibagikan dalam setiap langkah kecil maupun besar yang berhasil dilalui bersama.
14. Latok Bihun (Afiyah, Fathia, Nadia, Alike, dan Saca) sebagai teman selama masa perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi teman yang baik yang saling menyemangati satu sama lain selama proses penulisan skripsi dan turut merayakan setiap pencapaian penulis.

15. Teman-teman penulis selama perkuliahan (Husna Nur Azizah, Ayu Puspita, Atika Amelia, Putri Isma Agustin, dan Made Surya). Terima telah menjadi teman penulis berbagi cerita, diskusi, dan menjalani perkuliahan dengan penuh sukacita.
16. Ipot dan Keluarga Batu Raja (Meng, Pina, Leon, Paji, Rahil, Kentung) sebagai penyemangat penulis selama proses penulisan skripsi. Terima kasih atas perhatian dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian telah menjadi salah satu warna indah yang penuh keceriaan dan kebahagiaan dalam perjalanan panjang penyusunan skripsi penulis.
17. Teman KKN Beringin Jaya (Citra, Maysa, Sherly, Zalfa, Ilham, Bagus). Terima kasih telah hadir kebersamai penulis dengan turut merayakan setiap pencapaian selama proses skripsi. Terkhusus kepada Citra, terima kasih banyak atas perhatian, bantuan, dan menjadi tempat penulis berkeluh kesah. Terima kasih bersedia menghibur penulis serta mengikuti semua keinginan penulis ketika jenuh.
18. Sahabat penulis sejak SMP (Amel, Deta, Raihan, Rama) yang selalu memberikan semangat. Terima kasih telah menjaga ikatan persahabatan dan menjalin komunikasi dengan baik meskipun jarak memisahkan kita. Terima kasih bersedia mendengarkan curhatan penulis dan turut merayakan pencapaian dalam proses skripsi penulis. Terkhusus Rama, terima kasih telah kebersamai penulis sejak awal penulisan dengan dengan segala perhatian dan kejutan yang selalu berhasil menghadirkan senyum.
19. Sahabat penulis sejak SMA (Septi, Puput, dan Syahrul) yang senantiasa menjadi tempat penulis berbagi cerita tanpa rasa takut untuk dihakimi. Terima kasih turut merayakan setiap pencapaian penulis dengan perhatian dan doa tulus yang diberikan.
20. Setiap insan yang secara tidak langsung telah meninggalkan kesan mendalam bagi penulis, baik melalui ucapan maupun tindakan. Terima kasih membuat penulis percaya bahwa kebaikan masih ada dan doa tulus dari orang-orang sekitar turut memudahkan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

21. Astritia Latifa sebagai penulis skripsi ini. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena memilih untuk terus melangkah meskipun sering kali dihampiri rasa lelah, ragu, dan takut. Skripsi ini bukti dari setiap doa, air mata, kesabaran, dan usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menemukan jalannya. Semoga langkah yang akan datang tentunya dalam meraih cita-cita dipenuhi keberanian, keberkahan, dan kesemj untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Bandarlampung, 1 Juni 2026

Astritia Latifa

NPM. 2216071070

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Kerangka Analisis	20
2.2.1 Konsep Kebijakan Pertahanan.....	20
2.2.2 Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian	25
3.2 Fokus Penelitian.....	26
3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	26
3.4 Teknik Analisis Data	27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Kebijakan Pertahanan Era Kanselir Angela Merkel dan Olaf Scholz.....	31
4.1.1 Kebijakan Pertahanan Era Kanselir Angela Merkel (2005–2021) ...	32
4.1.2 Kebijakan Pertahanan Era Kanselir Olaf Scholz (2021–2024).....	42
4.2 Perubahan Kebijakan Pertahanan dari Era Kanselir Angela Merkel ke Kanselir Olaf Scholz	52
4.2.1 Perubahan yang digerakkan Pemimpin (<i>Leader Driven</i>).....	54
4.2.2 Perubahan Advokasi Birokrasi (<i>Bureaucratic Advocacy</i>).....	65
4.2.3 Perubahan Restrukturisasi Domestik (<i>Domestic Restructuring</i>).....	72
4.2.4 Perubahan dari Guncangan Eksternal (<i>External Shock</i>).....	77
4.2.5 Perubahan Program dan Tujuan Kebijakan Pertahanan Jerman.....	82
V. KESIMPULAN DAN SARAN	86

5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1. Anggaran Pertahanan Jerman dalam Miliar USD Tahun 2005 –2021	35
Tabel 4.2. Stok persenjataan Jerman Tahun 2014–2021	40
Tabel 4.3. Anggaran Pertahanan Jerman dalam Miliar USD tahun 2021– 2024 ..	44
Tabel 4.4. Pengadaan Sistem Persenjataan Jerman 2021 – 2024.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1. Data Defence Expenditure of NATO Countries (2014–2024) dari NATO	4
Gambar 1.2. Data Defence Budget dalam miliar USD dari IISS 2014–2021	5
Gambar 1.3. Data Defence Budget dalam miliar USD dari IISS 2021–2024.....	9
Gambar 1.4. Data Defence Expenditure of NATO Countries (2014 – 2024) dari NATO	10
Gambar 2.1. Visualisasi Jaringan antar Topik yang dianalisis Menggunakan VOSviewer.....	16
Gambar 2.2. Visualisasi Topik Penelitian Berdasarkan Tahun Publikasi yang dianalisis Menggunakan VOSviewer.....	17
Gambar 2.3. Visualisasi Kepadatan Topik Penelitian yang dianalisis Menggunakan VOSviewer.....	18
Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 3.1. Teknik Analisis Data Miles, Huberman, dan Saldana (2014)	30
Gambar 4.1. Share of GDP Jerman (%) tahun 2014–2021	45
Gambar 4.2. Prioritas pengadaan Jerman sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina 2020 – 2025	48
Gambar 4.3. Jumlah PDB Jerman dalam Triliun USD Tahun 2005–2024	59
Gambar 4.4. Persentase Alokasi Pertahanan dari PDB Jerman Tahun 2005 – 2024	61

DAFTAR SINGKATAN

AGS	: <i>Alliance Ground Surveillance</i>
AWACS	: <i>Airborne Warning and Control System</i>
DIP	: <i>Defense Investment Pledge</i>
EATC	: <i>European Air Transport Command</i>
eFP	: <i>enhanced Forward Presence</i>
EIB	: <i>European Investment Bank</i>
ERBD	: <i>European Bank for Reconstruction and Development</i>
ESSI	: <i>European Sky Shield Initiative</i>
IISS	: <i>International Institute for Strategic Studies</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
MEADS	: <i>Medium Extended Air Defense System</i>
MARS	: <i>Medium Artillery Rocket System</i>
MGCS	: <i>Main Ground Combat System</i>
MLRS	: <i>Multiple Rocket Launcher System</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NCW	: <i>Network Centric Warfare</i>
NRF	: <i>NATO Response Force</i>
NSS	: <i>National Security Strategy</i>
PDB	: <i>Produk Domestik Bruto</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa Bangsa</i>
SIPRI	: <i>Stockholm International Peace Research Institute</i>
VTJF	: <i>Very High Readiness Joint Task Force</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kekalahan dalam Perang Dunia II, Jerman mengalami perubahan besar dari negara agresif menjadi negara yang menempatkan perdamaian dan kerja sama internasional sebagai dasar kebijakannya. Berdirinya Republik Federal Jerman (Jerman Barat) pada tahun 1949 menandai penolakan terhadap penggunaan kekuatan militer dengan memilih bergabung dalam kerja sama Eropa Barat yang didorong oleh pengalaman buruk masa perang serta kebutuhan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dunia (Tewes, 2002). Ketika reunifikasi Jerman terjadi pada tahun 1990, muncul kekhawatiran bahwa negara ini akan meninggalkan pendekatan damai dan kembali menggunakan kekuatan militer, tetapi Jerman tetap mempertahankan identitas politik luar negeri sebagai *civilian power* yakni pendekatan melalui cara-cara sipil dalam mempromosikan perdamaian melalui kerja sama multilateral, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, dan penyebaran nilai-nilai demokrasi (Tewes, 2002). Dalam hubungan dengan negara-negara Eropa Timur, Jerman telah turut berperan membantu Polandia, Ceko, dan Hungaria bergabung dengan NATO serta Uni Eropa yang menunjukkan bahwa peran *civilian power* termasuk strategi jangka panjang menciptakan keamanan dan kemakmuran regional (Tewes, 2002).

Jerman berkomitmen pada Uni Eropa, NATO, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai upaya meningkatkan respons bersama terhadap berbagai tantangan dan ancaman keamanan yang muncul. Melalui lembaga-lembaga ini, Jerman menerapkan kebijakan luar negeri dan keamanan "*networked*" yang berfokus pada kerja sama kolektif dan pembagian beban internasional (Congressional Research Service, 2010). Pendekatan ini meliputi pencegahan dan penyelesaian konflik, stabilisasi kawasan pascakonflik,

penanggulangan terorisme internasional, hingga pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal yang dijalankan dengan berlandaskan hukum internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, politisi maupun publik Jerman secara konsisten menolak tindakan internasional yang tidak memperoleh mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang berpotensi melanggar standar hukum internasional serta hak asasi manusia (Congressional Research Service, 2010).

Konstitusi Jerman (*Grundgesetz*) menempatkan hukum internasional di atas hukum nasional yang melarang secara tegas segala bentuk perang agresi. Pasal 25 menyebutkan bahwa aturan umum hukum internasional menjadi bagian integral dari hukum federal, sedangkan Pasal 26 melarang tindakan yang mengganggu perdamaian antarbangsa terutama persiapan perang agresi, dan menetapkan bahwa tindakan tersebut harus dipidana (Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, t.t.). Ketentuan ini bukan hanya sebagai pernyataan normatif, melainkan sebagai aturan yang memiliki daya ikat dalam praktik kebijakan negara. Daniel Lovric (2006) menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Jerman disusun dengan semangat *Völkerrechtsfreundlichkeit* atau “bersahabat dengan hukum internasional,” sehingga norma-norma internasional yang berhubungan dengan perdamaian menjadi bagian dari kerangka konstitusional dan dapat ditegakkan di tingkat domestik (Lovric, 2006). Brian C. Rathbun juga menyatakan bahwa *bundestag* memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap pengerahan pasukan, sementara Mahkamah Konstitusi Federal menegaskan keterlibatan militer Jerman di luar negeri hanya sah bila sesuai dengan larangan agresi dan prinsip perdamaian (Rathbun, 2006). Seperti pernyataan Lovric (2006), desain normatif *Grundgesetz* sebagai mekanisme pencegahan kelembagaan terhadap kebijakan luar negeri yang bersifat agresif.

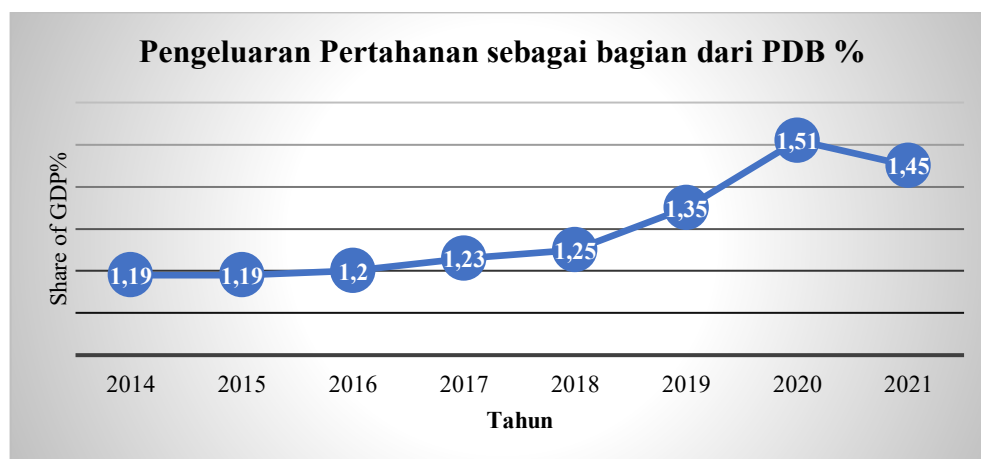
Pemimpin Jerman dihadapkan dengan realitas yang terus berubah dalam lingkungan keamanan Eropa dengan tuntutan penyesuaian lebih proaktif. Ketika Rusia melakukan Invasi ke Ukraina melalui aneksasi Krimea pada 2014, tindakan tersebut menjadi ancaman nyata terhadap keamanan Eropa dan norma-norma internasional. Situasi ini membuat Jerman yang secara konstitusional

dibatasi dalam penggunaan kekuatan untuk menyeimbangkan kewajiban aliansi dengan pembatasan domestik. Di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel, Jerman menyatakan bahwa tindakan militer bukanlah pilihan utama dalam penyelesaian konflik. Dalam pidatonya di *Bundestag* pada tanggal 13 Maret 2014, Kanselir Angela Merkel menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil pendekatan tiga arah melalui, perundingan, bantuan, dan sanksi yang setiap langkah baru dalam krisis dilakukan dengan koordinasi yang erat bersama mitra Uni Eropa (Auswärtiges Amt, 2014).

Terdapat tiga langkah utama yang saling melengkapi dalam merespon tindakan Invasi Rusia ke Ukraina disampaikan Angela Merkel (Auswärtiges Amt, 2014). Pertama, jalur diplomasi melalui pembentukan *international observer mission* untuk memverifikasi klaim di lapangan dan memberikan gambaran objektif mengenai situasi di Ukraina dengan mengusulkan *contact group* sebagai saluran komunikasi langsung antara Moskow dan Kyiv. Kedua, Jerman bersama Uni Eropa memberikan dukungan ekonomi kepada Ukraina melalui paket bantuan senilai 11 miliar euro yang melibatkan European Investment Bank (EIB) dan European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) dengan koordinasi bersama IMF. Bantuan ini bertujuan menstabilkan perekonomian, memfasilitasi pemilu yang bebas, mendorong reformasi institusional, dan memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber pasokan. Ketiga, Merkel menyatakan kesiapan Jerman mendukung penerapan sanksi terhadap Rusia secara bertahap dan terkoordinasi dengan Uni Eropa serta mitra transatlantik guna menekan Rusia agar kembali ke jalur hukum internasional dan prinsip kerja sama damai.

Selain itu, kanselir Angela Merkel memperkuat keamanan kolektif bersama negara anggota NATO melalui peningkatan anggaran pertahanan. Pada tahun 2014, NATO mengadakan konferensi tingkat tinggi pertama yang diselenggarakan di Wales membahas terkait *Defense Investment Pledge* (DIP) diatur lebih lanjut dalam pasal 14 menetapkan target 2% dari PDB untuk belanja pertahanan serta menetapkan tujuan tambahan bagi seluruh anggota agar menghabiskan lebih dari 20% anggaran pertahanan untuk peralatan utama, termasuk penelitian dan pengembangan sebagai investasi dalam kemampuan

pertahanan baru (NATO, 2014). Sejak saat itu, tingkat pengeluaran pertahanan Jerman turut meningkat dari 1,19% tahun 2014 menjadi 1,51% tahun 2020.



Gambar 1.1. *Data Defence Expenditure of NATO Countries (2014–2024)* dari NATO

Sumber: diolah oleh peneliti

Buku putih pertahanan Jerman tahun 2016 menyebutkan bahwa strategi pertahanan harus dibangun di atas pendekatan keamanan yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan, masyarakat, hingga sektor swasta. Ancaman kontemporer tidak lagi dapat dibedakan antara dimensi internal dan eksternal, melainkan hadir dalam bentuk hibrida yang memanfaatkan kerentanan masyarakat terbuka (The Federal Government, 2016). Dalam kerangka ini, penguatan kapasitas bertindak bersama NATO serta Uni Eropa sebagai prioritas yang dilakukan melalui penyatuan bertahap angkatan bersenjata Eropa, penguatan pilar Eropa NATO, dan koordinasi antar kedua organisasi tersebut. Selain itu, menjamin keamanan jalur perdagangan, pasokan energi, ruang siber, serta antariksa yang dipandang sebagai penopang utama bagi keberlangsungan perekonomian nasional. Selanjutnya, pencegahan dan resolusi krisis menjadi fokus utama dengan menekankan pentingnya deteksi dini, tata kelola yang baik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pemberdayaan aktor lokal untuk memastikan stabilisasi jangka panjang (The Federal Government, 2016).

Angkatan bersenjata Jerman (*Bundeswehr*) lebih difokuskan pada operasi manajemen krisis internasional karena berkurangnya ancaman langsung

setelah perang dingin mendorong pemangkasan anggaran pertahanan dan kekuatan militer (The Federal Government, 2016). Namun, orientasi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah pasukan, ketersediaan peralatan, dan tuntutan tugas yang dihadapi. Seiring meningkatnya konflik di berbagai kawasan, Jerman dituntut untuk memainkan peran yang lebih besar, baik melalui NATO, Uni Eropa, maupun kerangka multilateral lainnya. Oleh karena itu, perlunya reorientasi strategi dengan menempatkan kembali pertahanan nasional dan kolektif sebagai prioritas utama yang disertai transformasi *Bundeswehr* agar lebih fleksibel, multifungsi, dan adaptif dalam menghadapi berbagai jenis ancaman. Berdasarkan data dari International Institute for Strategic Studies (IISS), anggaran pertahanan Jerman fluktuatif tahun 2014 sebesar \$43,1 miliar mengalami penurunan tahun 2015 menjadi \$36,6 miliar, dan konsisten meningkat dari tahun 2016 hingga 2021 mencapai \$55,5 miliar (IISS, 2025b).



Gambar 1.2. *Data Defence Budget* dalam miliar USD dari IISS 2014–2021
Sumber: diolah oleh peneliti

Adanya peningkatan anggaran termasuk upaya Jerman memperkuat kapasitas pertahanan nasional dalam memenuhi kewajiban kolektif. Pendekatan keamanan juga diusung tidak hanya berbasis militer, tetapi juga melibatkan instrumen diplomasi, pembangunan, serta koordinasi lintas kementerian dalam mewujudkan keamanan kawasan. Keberhasilan transformasi tentunya

bergantung pada pendanaan yang stabil, ketersediaan personel yang memadai, serta modernisasi peralatan pertahanan. Komitmen Jerman terhadap integrasi pertahanan Eropa melalui partisipasi aktif dalam berbagai inisiatif multinasional. Pada *level armed forces integration*, Jerman terlibat dalam pembentukan unit gabungan seperti French-German Brigade, *NATO Standing Maritime Task Forces*, serta pertukaran pasukan permanen dengan Belanda dan Polandia (The Federal Government, 2016). Selanjutnya, *level armed forces interconnection*, Jerman mendukung struktur komando multinasional seperti European Corps, German–Netherlands Corps di Münster, Multinational Corps Northeast di Szczecin, serta *Multinational Joint Headquarters* di Ulm (The Federal Government, 2016). Selain itu, Jerman berkontribusi sebagai negara pemimpin dalam NATO Response Force termasuk *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF) yang disetujui pada 2014 dan kini beroperasi penuh, serta berpartisipasi dalam EU *Battlegroups* sebagai pasukan reaksi cepat Uni Eropa. Dukungan terhadap kapabilitas kolektif juga diwujudkan melalui kontribusi personel pada *Airborne Warning and Control System* (AWACS), *Alliance Ground Surveillance* (AGS) yang mulai beroperasi pada 2017, serta *European Air Transport Command* (EATC) dan kekuatan pengawasan maritim.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kanselir Angela Merkel terkait kondisi angkatan bersenjata Jerman selalu dianggap mengalami krisis kesiapan, kekurangan peralatan modern, dan keterlambatan dalam proses pengadaan senjata (Giegerich & Terhalle, 2021). Kepemimpinan Kanselir Angela Merkel berakhir pada tahun 2021 setelah menjabat selama 16 tahun dan digantikan oleh Olaf Scholz. Dalam rentang waktu dua bulan Olaf Scholz menjabat sebagai Kanselir Jerman terjadi invasi Rusia ke Ukraina berskala besar yang berlangsung hingga saat ini. Tiga hari kemudian, tepatnya tanggal 27 Februari 2022 Olaf Scholz berpidato di *Bundestag* menggunakan istilah *Zeitenwende* memiliki arti titik balik yang menandai penilaian ulang terhadap peran Jerman dalam menjaga keamanan kawasan. Ia menyatakan bahwa perang Rusia-Ukraina telah menghancurkan tatanan keamanan Eropa yang telah berlaku hampir setengah abad sejak perjanjian final Helsinki dan Jerman harus meresponsnya dengan kebijakan yang lebih tegas dan realistis (Scholz, 2022a).

Berdasarkan sejarah, Jerman terkenal dengan pendekatan yang penuh pertimbangan dalam keterlibatan militer dan ketergantungan pada solusi diplomatik. Namun, invasi Rusia ke Ukraina yang telah berkembang menjadi perang membuat Jerman menghadapi tekanan yang semakin besar untuk merespons terhadap ancaman keamanan di Eropa. Pidato Kanselir Scholz menjelaskan inisiatif strategis dalam meningkatkan kemampuan pertahanan nasional, mengurangi ketergantungan energi pada Rusia, dan memperkuat aliansi di dalam NATO dan Uni Eropa. Kanselir Olaf Scholz menyatakan bahwa Jerman akan mendukung Ukraina dengan memasok senjata termasuk sebuah keputusan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan dalam politik luar negeri. Jerman menduduki posisi kedua setelah Amerika Serikat sebagai pemberi bantuan militer tertinggi dalam miliar euro. Hampir €15 miliar telah disalurkan hingga akhir 2023, termasuk €1,6 miliar pada 2022, €5 miliar pada 2023, €2,9 miliar untuk pengadaan alat militer antara 2025–2028, serta €5,2 miliar berupa perlengkapan dari stok militer Jerman (Die Bundesregierung, 2025). Dalam pelatihan lebih dari 10.000 tentara Ukraina, Jerman mengalokasikan dana sebesar €282 juta. Untuk bantuan yang diberikan mencakup berbagai peralatan militer hingga dukungan logistik, seperti sistem pertahanan udara (IRIS-T dan Patriot), senjata anti-tank, tank Leopard 1 dan 2, kendaraan tempur Marder, peluncur roket MARS, howitzer, drone pengintai, kendaraan pembersih ranjau, peralatan medis, pakaian musim dingin, dan lebih dari 47 juta butir amunisi.

Selain itu, pemerintah akan membentuk dana pertahanan khusus sebesar €100 miliar yang dialokasikan untuk modernisasi militer, pengadaan persenjataan baru, dan peningkatan kapasitas operasional *Bundeswehr* (Scholz, 2022a). Menurut data dari IISS, anggaran pertahanan Jerman melonjak signifikan menjadi \$86 miliar (EUR 78,9 miliar) setara 1,83% dari PDB tahun 2024 yang menempatkan Jerman sebagai negara dengan anggaran terbesar keempat di dunia, naik dari posisi ketujuh pada tahun sebelumnya dan tertinggi di kawasan Eropa untuk pertama kalinya sejak reunifikasi pada 1990 (IISS, 2025a). Selaras dengan data tersebut, SIPRI melaporkan pengeluaran militer Jerman tahun 2024 meningkat selama tiga tahun berturut-turut, yakni mencapai \$88,5 miliar atau 1,9 persen dari PDB, sehingga menduduki peringkat keempat

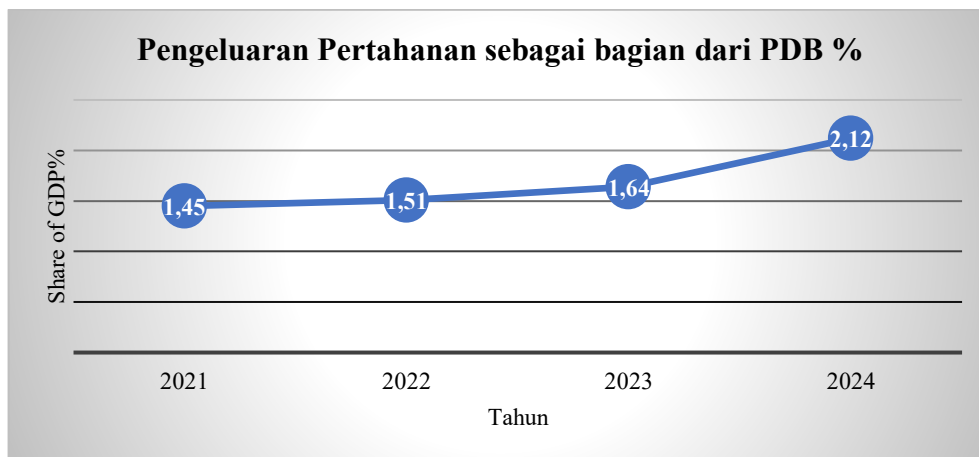
pengeluaran militer terbesar dunia (SIPRI, 2025a). Pengeluaran militer Jerman naik sebesar 28 persen dibandingkan tahun 2023 dan meningkat 89 persen dibandingkan tahun 2015, seiring dengan terus dilaksanakannya dana tambahan di luar anggaran sebesar €100 miliar (\$105 miliar pada tahun 2022) yang dibentuk pada tahun 2022 untuk memperkuat anggaran militer (SIPRI, 2025a).

Peningkatan anggaran sebagai kebijakan pengadaan besar didanai melalui Dana Khusus *Bundeswehr* menunjukkan komitmen Jerman dalam memperkuat postur pertahanan. Pengadaan persenjataan baru meliputi pesawat tempur F-35A yang akan terlibat pada mekanisme *nuclear sharing* NATO dengan diiringi pengembangan drone Heron (Scholz, 2022a). Selain memperkuat kerja sama persenjataan dengan negara-negara Eropa, seperti proyek jet tempur dan tank generasi baru bersama Prancis, investasi juga dialokasikan ke berbagai dimensi kekuatan militer (Bundesministerium der Verteidigung, 2022a). Pada sektor darat, modernisasi mencakup kendaraan tempur Puma dan pengembangan tank tempur *Main Ground Combat System* (MGCS). Selanjutnya, dimensi laut diperkuat melalui fregat tipe 126, korvet tipe 130, kapal selam tipe 212, serta sistem persenjataan bawah laut lainnya. Sektor udara, Jerman mengakuisisi F-35A, helikopter CH-47F Chinook, dan *Eurofighter* ECR (*Electronic Combat Role*) untuk misi pengintaian. Dalam mendukung kemampuan bekerja bersama dengan sekutu NATO, bidang digitalisasi, dan sistem komando ditingkatkan mulai dari pengadaan perangkat komunikasi terenkripsi, jaringan data militer, hingga infrastruktur komunikasi satelit.



Gambar 1.3. *Data Defence Budget* dalam miliar USD dari IISS 2021–2024
Sumber: diolah oleh peneliti

Dalam pidatonya, Kanselir Olaf Scholz menegaskan komitmen Jerman memenuhi target NATO dengan mengalokasikan lebih dari 2% PDB untuk belanja pertahanan setiap tahun. Pada 2024, alokasi belanja pertahanan Jerman mencapai 2,12%, menunjukkan kontribusi serius terhadap keamanan kolektif (NATO, 2024). Sebagai bagian dari reformasi pertahanan udara, Jerman memimpin *European Sky Shield Initiative* (ESSI) yang diluncurkan pada 13 Oktober 2022 di Brussel lokasi markas besar NATO bersama lebih dari 20 negara Eropa (Bundesministerium der Verteidigung, 2022b). ESSI bertujuan membangun sistem pertahanan udara berlapis (jarak pendek, menengah, dan jauh) untuk menghadapi ancaman seperti rudal balistik, drone, hingga senjata hipersonik, melalui pengadaan bersama dan interoperabilitas. Sistem IRIS-T, Patriot, dan Arrow 3 yang berada di setiap lapisan akan diintegrasikan ke dalam struktur pertahanan udara NATO. Jerman juga mengerahkan tambahan pasukan ke dalam kelompok tempur multinasional yang dipimpinnya di Lituania sebagai langkah awal untuk meningkatkan kehadirannya dari tingkat batalion menjadi brigade pada bulan April 2024. Peningkatan jumlah pasukan terus berlangsung dengan sepenuhnya beroperasi mencapai 5.000 personel di tahun 2027 (NATO, 2025).



Gambar 1.4. *Data Defence Expenditure of NATO Countries (2014 – 2024)* dari NATO

Sumber: diolah oleh peneliti

Perubahan kebijakan keamanan yang disampaikan Kanselir Olaf Scholz berlanjut pada penerbitan National Security Strategy (NSS) pertama Jerman pada 14 Juni 2023 yang menjadi tonggak penting dalam mengarahkan ulang kebijakan keamanan negara tersebut. Melalui konsep *integrated security*, dokumen ini menegaskan bahwa keamanan nasional Jerman tidak dapat dipisahkan dari stabilitas kawasan Eropa, sehingga penguatan NATO dan kerja sama pertahanan Uni Eropa ditempatkan sebagai fondasi utama. NSS secara eksplisit menyebut Rusia sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian dan tatanan keamanan di Eropa, sementara Tiongkok dipandang secara tidak sepenuhnya jelas sebagai mitra ekonomi, pesaing dan lawan dalam sistem politik yang membutuhkan strategi pragmatis (The Federal Government, 2023). Jerman berupaya menunjukkan pergeseran dari tradisi kehati-hatian militer menuju peran yang lebih aktif sebagai aktor strategis yang memikul tanggung jawab lebih besar dalam menjaga keamanan Eropa dan tatanan internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Ketika terjadi invasi Rusia ke Ukraina melalui aneksasi atas Krimea tahun 2014, Kanselir Angela Merkel merespon tersebut dengan membentuk kebijakan pertahanan yang mengedepankan diplomasi, kerja sama multilateral, dan memberikan sanksi. Kebijakan ini dijalankan secara bertahap dengan terkoordinasi melalui Uni Eropa, NATO, serta mitra transatlantik lainnya dalam

menekan Rusia agar kembali ke jalur hukum internasional memegang prinsip kerja sama damai. Namun, situasi berubah ketika terjadi Invasi kedua berskala besar yang menyebabkan perang hingga saat ini. Kanselir Olaf Scholz memperkenalkan istilah *Zeitenwende* pada pidato tahun 2022 yang menandai pergeseran dalam orientasi kebijakan keamanan Jerman yang ditunjukkan melalui pembentukan dana pertahanan khusus €100 miliar, mendukung Ukraina dengan memasok senjata, serta komitmen memenuhi target NATO 2%. Kehadiran *National Security Strategy* tahun 2023 juga menunjukkan sikap tegas pemerintah dalam memberikan arah yang lebih jelas bagi kebijakan pertahanan Jerman dengan tanggung jawab lebih besar untuk menjamin keamanan kolektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul pertanyaan penelitian mengenai “Bagaimana perubahan kebijakan pertahanan Jerman dari era Kanselir Angela Merkel ke Kanselir Olaf Scholz?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan kebijakan pertahanan era Kanselir Angela Merkel dan Kanselir Olaf Scholz
2. Menganalisis perubahan kebijakan pertahanan Jerman dari era Kanselir Angela Merkel ke era Olaf Scholz

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian hubungan internasional terutama dalam memahami perkembangan kebijakan pertahanan Jerman dari era Kanselir Angela Merkel ke Kanselir Olaf Scholz dan hendaknya mampu memberikan pemahaman mengenai perubahan kebijakan keamanan negara besar di Eropa yang relevan untuk menambah literatur serta studi keamanan kontemporer.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan dua puluh penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perubahan kebijakan keamanan Jerman dari era Kanselir Angela Merkel ke era Kanselir Olaf Scholz. Proses pengumpulan penelitian terdahulu dilakukan melalui pencarian jurnal ilmiah menggunakan laman *SciSpace* dengan kata kunci *The Shift in German Security Policy*, *Changes in German Defense Policy*, *German Defense Policy*, dan *Changes in State Security Policy*. Setiap kata kunci menghasilkan sekitar 100 artikel yang kemudian diseleksi secara bertahap. Tahap pertama dilakukan dengan membaca judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian topik dengan fokus penelitian. Selanjutnya, artikel yang diseleksi kembali dengan mempertimbangkan periode waktu penelitian, fokus pembahasan pada kebijakan keamanan Jerman, serta keterkaitan dengan konteks perang Rusia-Ukraina. Dari proses tersebut, diperoleh dua puluh artikel yang digunakan sebagai penelitian terdahulu. Untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan sumber, peneliti mengakses teks lengkap artikel melalui beberapa basis data jurnal, yaitu JSTOR, Springer Nature, Taylor & Francis, Cogitatio Press, dan Dergipark Academic. Penelitian-penelitian yang terpilih digunakan untuk memahami faktor penyebab, proses perubahan, serta arah kebijakan pertahanan Jerman, serta dilengkapi dengan beberapa penelitian dari negara lain sebagai bahan pembandingan dalam melihat pola perubahan kebijakan keamanan.

Penelitian Esra Ağralı (2024) dan Huiyi Tian (2023) terkait perubahan kebijakan luar negeri serta kebijakan keamanan dan pertahanan Jerman dijelaskan sebagai hasil dari adanya faktor internal dan eksternal. Menggunakan kerangka Neoclassical Realism (Rose, 1998) dan model perubahan kebijakan

luar negeri Jakob Gustavsson, keduanya menilai bahwa tekanan dari lingkungan internasional, terutama akibat perang Rusia-Ukraina yang selaras dengan kondisi domestik mulai dari opini publik, budaya politik yang cenderung antimiliter, serta gaya kepemimpinan Olaf Scholz yang berhati-hati. Perubahan arah kebijakan ini menunjukkan pergeseran dari orientasi transatlantik menuju peran yang lebih aktif di kawasan Eropa melalui Common Security and Defence Policy (CSDP) sebagai bentuk adaptasi terhadap tantangan keamanan baru tanpa meninggalkan komitmen terhadap multilateralisme (Ağrali, 2024; Tian, 2023)

Pandangan yang sejalan juga dijelaskan oleh Patrick A. Mello (2022) dan Tobias Bunde (2023). Keduanya menilai bahwa kebijakan *Zeitenwende* menjadi titik penting dalam arah baru keamanan Jerman pasca invasi Rusia ke Ukraina. Mello (2022) menekankan bahwa *Zeitenwende* mencerminkan perubahan orientasi internasional berdasarkan analisis menggunakan FPA Herman dengan peningkatan belanja pertahanan dan keterlibatan aktif dalam NATO, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan birokratis dan resistensi politik (Mello, 2024). Selanjutnya, Bunde (2025) melihat *Zeitenwende* sebagai respons terhadap krisis identitas Jerman yang menjelaskan nilai-nilai civilian power sebelumnya dominan, kini harus disesuaikan dengan situasi keamanan Eropa yang lebih tegang (Bunde, 2025).

Penelitian Bernhard Blumenau (2023) dan Kristina Spohr (2024) memberikan hubungan historis antara era Merkel dan Scholz. Blumenau (2023) menegaskan bahwa *Zeitenwende* memang membawa arah baru dalam hubungan luar negeri Jerman, tetapi prinsip lama mengenai keterikatan pada Barat dan kerja sama internasional tetap dipertahankan (Blumenau, 2022). Berbeda dengan itu, Spohr (2024) menyatakan adanya perubahan dari kebijakan luar negeri yang cenderung tenang pada masa Merkel menuju kebijakan yang lebih berani di era Scholz menunjukkan Jerman mulai aktif terlibat dalam urusan keamanan Eropa melalui peningkatan anggaran pertahanan dan pengiriman bantuan militer ke Ukraina (Spohr, 2023).

Dalam konteks militer, Hazal Can dan Murat Önsoy (2022) serta Zdeněk Kříž (2018) menyoroti transformasi peran *bundeswehr* pada kebijakan

keamanan. Can dan Önsoy (2022) menunjukkan bahwa pasukan Jerman saat ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga perdamaian, tetapi lebih siap berpartisipasi dalam operasi militer internasional serta kerja sama pertahanan NATO sejak Invasi Rusia ke Ukraina (Can & Önsoy, 2023). Kříž (2018) turut memberikan penjelasan terkait reformasi pertahanan Jerman berjalan lambat karena pengaruh budaya strategis yang menekankan pembatasan militer (*restrained civilian power*) walaupun ancaman Rusia telah mempercepat upaya modernisasi pertahanan (Kříž, 2018).

Dari sisi identitas dan narasi keamanan, Georg Löfflmann dan Malte Riemann (2025) serta Dirk Nabers dan Frank Stengel (2024) memandang *Zeitenwende* sebagai proses penataan ulang identitas keamanan Jerman. Löfflmann dan Riemann (2025) menjelaskan bahwa invasi Rusia menyebabkan guncangan terhadap identitas nasional, sehingga pemerintah Jerman berupaya membangun rasa aman baru melalui kebijakan pertahanan yang lebih tegas (Löfflmann & Riemann, 2025). Sementara itu, Nabers dan Stengel (2024) menambahkan bahwa *Zeitenwende* termasuk hasil dari konstruksi krisis dalam wacana politik yang memberikan legitimasi terhadap kebijakan keamanan baru yang bukan terjadi dari adanya guncangan eksternal (Nabers & Stengel, 2025).

Penelitian Adrian G.V. Hyde-Price (2022) serta Lisbeth Aggestam dan Hyde-Price (2015) turut menyoroiti dilema kepemimpinan Jerman di Eropa. Hyde-Price (2022) menggambarkan kebangkitan Jerman sebagai “*sleep-walking giant*” yang mulai aktif dalam keamanan internasional meskipun masih dibatasi oleh warisan budaya antimiliter (Hyde-Price, 2015). Selanjutnya, Lisbeth Aggestam dan Hyde-Price (2023) menyatakan kepemimpinan Jerman bersifat kolektif dan prosesusual dengan bergantung pada ekspektasi negara-negara mitra, sehingga perubahan kebijakan keamanan juga dipengaruhi oleh interaksi antara tuntutan eksternal dan dinamika domestik (Aggestam & Hyde-Price, 2020).

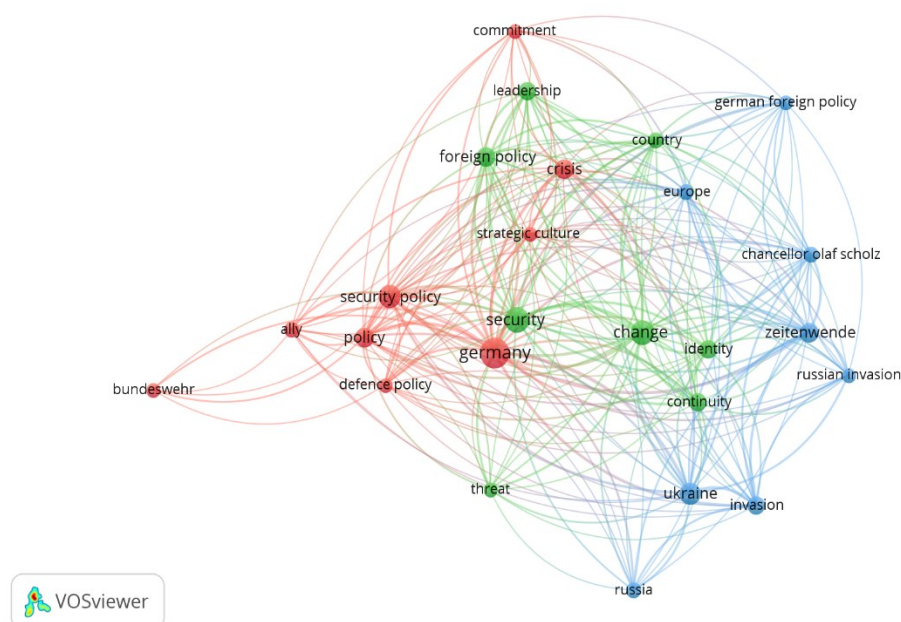
Penelitian Robin Marc Allers (2016) dan Jonas J. Driedger (2022) menyoroiti aspek kontinuitas dan reaktivitas dalam kebijakan keamanan Jerman. Allers (2016) menjelaskan bahwa Jerman memiliki pendekatan khas dalam manajemen krisis melalui kombinasi instrumen sipil dan militer dengan

kecenderungan kuat terhadap pendekatan diplomatik (Allers, 2016). Kemudian, Driedger (2022) menunjukkan bahwa kebijakan pada awalnya melanjutkan pola lama era Angela Merkel hingga terjadi invasi Rusia pada 2022 mendorong perubahan cepat, termasuk pembentukan dana pertahanan €100 miliar dan penghentian proyek Nord Stream 2 (Driedger, 2022). Selain itu, penelitian Mario Marinov (2022) menekankan dimensi institusional kebijakan keamanan Jerman. Menurutnya, reformasi pertahanan tetap berakar pada kerangka kerja NATO dan kebijakan nasional yang disesuaikan dengan kondisi baru di Eropa. Walaupun masih ada resistensi publik terhadap peningkatan militerisasi, dinamika global membuat langkah tersebut semakin tidak terhindarkan (Marinov, 2022).

Beberapa penelitian digunakan sebagai perbandingan dengan negara lain. Dovilė Jakniūnaitė (2016) dan Ieva Karpavičiūtė (2017) meneliti kebijakan keamanan negara-negara Baltik yang menghadapi ancaman Rusia dan menemukan bahwa persepsi ancaman menjadi faktor utama dalam pembentukan kebijakan pertahanan yang mirip dengan Jerman pasca-2022 (Jakniūnaite, 2016; Karpavičiūtė, 2017). Matthew Frear dan Honorata Mazepus (2018) menunjukkan bahwa Rusia menggunakan wacana keamanan untuk memperkuat legitimasi politiknya, sedangkan Mohammad Jamshidi dan Farnaz Noori (2020) menemukan bahwa strategi keamanan Amerika Serikat berubah mengikuti pendekatan pemerintahan yang berkuasa dengan tetap menjaga orientasi hegemonik (Frear & Mazepus, 2021; Jamshidi & Noori, 2017). Kemudian, Ivan V. Yakoviyk dkk. (2021) meneliti kebijakan keamanan Ukraina yang berfokus pada penguatan sistem pertahanan nasional dan respons terhadap ancaman Rusia (Yakoviyk dkk., 2020).

Dari dua puluh penelitian terdahulu tersebut, peneliti analisis menggunakan alat bantu VOSviewer berdasarkan teks yang berada pada judul dan abstrak untuk melihat hubungan antar topik, tren tahun publikasi, dan kepadatan riset. Analisis pertama penulis pada peta hubungan antar topik yang menunjukkan bahwa tema *Germany* termasuk topik paling dominan dalam literatur yang diteliti, yang ditandai dengan ukuran lingkaran yang relatif besar dan posisinya yang berada di pusat jaringan. Hal ini mengindikasikan bahwa

topik tersebut paling sering muncul dan memiliki keterkaitan dengan berbagai tema lainnya.

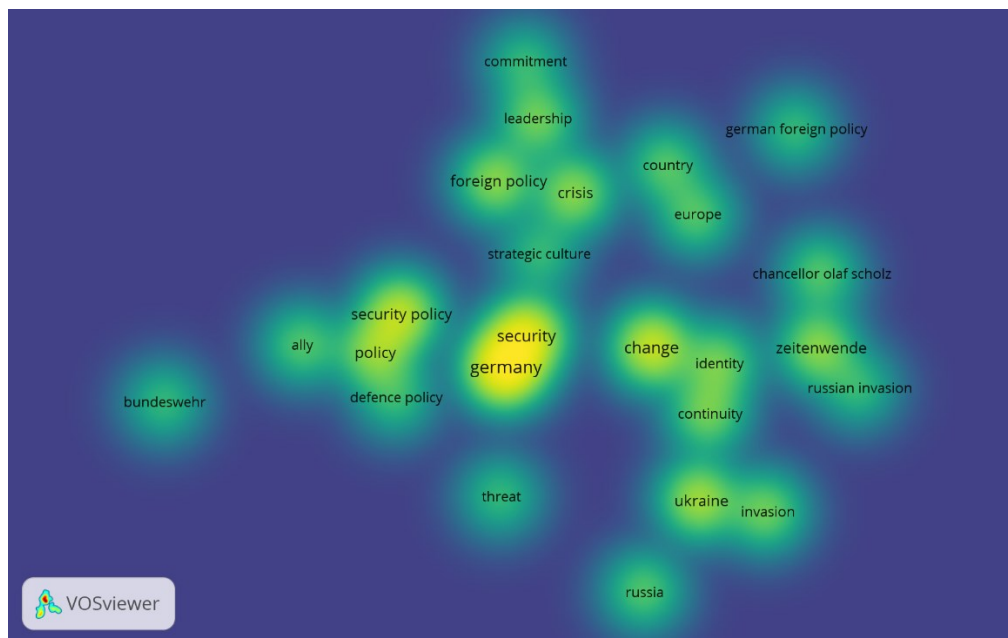


Gambar 2.1. Visualisasi Jaringan antar Topik yang dianalisis Menggunakan VOSviewer

Sumber : diolah oleh peneliti menggunakan *VOSviewer*

Berdasarkan visualisasi terdapat tiga kluster utama yang ditunjukkan oleh perbedaan warna *node*. Kluster merah berfokus pada isu kebijakan keamanan dan pertahanan Jerman yang berkaitan antara kata *Germany*, *security policy*, *defence policy*, *policy*, *ally*, *Bundeswehr*, *crisis*, dan *commitment*. Hubungan antar topik dalam kluster ini membahas transformasi kebijakan keamanan dan pertahanan Jerman serta komitmennya terhadap sekutu di tengah berbagai krisis internasional. Kluster hijau berpusat pada tema perubahan keamanan dan kebijakan luar negeri, yang mencakup kata *security*, *change*, *foreign policy*, *leadership*, *country*, *threat*, *continuity*, dan *identity*. Kedekatan antar node menunjukkan isu perubahan orientasi keamanan Jerman dikaitkan dengan identitas nasional, kepemimpinan, serta tantangan dari adanya ancaman internasional. Kluster biru berfokus pada konsep *Zeitenwende* dan implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Jerman setelah invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini

terhadap perubahan kebijakan luar negeri dan keamanan Jerman dalam konteks dinamika geopolitik Eropa. Sementara itu, topik yang berwarna kuning atau cerah menunjukkan tema terbaru yang dominan diteliti pada tahun 2023–2024, terkait *Zeitenwende*, Ukraine, *Russian invasion*, *invasion*, *Chancellor Olaf Scholz*, dan *defence policy*. Dominasi warna kuning pada kata tersebut mengindikasikan bahwa invasi Rusia ke Ukraina dengan deklarasi *Zeitenwende* oleh Kanselir Olaf Scholz menjadi isu baru dan populer dalam literatur.



Gambar 2.3. Visualisasi Kepadatan Topik Penelitian yang dianalisis Menggunakan VOSviewer

Sumber : diolah oleh peneliti menggunakan *VOSviewer*

Analisis *density visualization* menunjukkan tingkat kepadatan dengan fokus penelitian pada tema kebijakan keamanan serta kebijakan luar negeri Jerman. Pada peta ini, kata *Germany* dan *security* berada pada area dengan warna paling terang, sehingga dapat diidentifikasi sebagai pusat perhatian utama dan topik yang dominan diteliti. Selain itu, terdapat kata *change*, *Ukraine*, *invasion*, *identity*, *policy*, dan *security policy* juga berada pada area dengan warna kuning hingga hijau terang, termasuk tema-tema yang memiliki tingkat perhatian cukup tinggi dan dominan dikaji bersama dalam penelitian. Sementara itu, kata *Bundeswehr*, *threat*, *German foreign policy*, *commitment*,

leadership, dan *strategic culture* berada pada area hijau hingga biru yang menandakan intensitas penelitian relatif lebih rendah. Selanjutnya, area berwarna biru pudar yang mengelilingi beberapa topik tersebut menunjukkan ruang penelitian yang belum banyak dieksplorasi, yang terkait hubungan antara budaya strategis, kepemimpinan, komitmen internasional, dan transformasi kebijakan keamanan Jerman pasca diperkenalkan istilah *Zeitenwende*. Visualisasi ini menampilkan fokus utama penelitian saat ini terpusat pada isu keamanan Jerman dan dampak perang Rusia–Ukraina.

Berdasarkan dua puluh penelitian terdahulu dengan analisis menggunakan alat bantu *VOSviewer* dapat diketahui bahwa perubahan kebijakan keamanan Jerman setelah invasi Rusia ke Ukraina dipengaruhi oleh tekanan dari lingkungan internasional serta kondisi dalam negeri Jerman. Sebagian besar penelitian menjelaskan bahwa perang Rusia-Ukraina mendorong Jerman untuk meningkatkan anggaran pertahanan, memperkuat peran militer, serta lebih aktif dalam kerja sama keamanan dengan NATO dan negara-negara Eropa. Selain itu, terdapat faktor domestik seperti budaya politik yang cenderung antimiliter, pandangan masyarakat, serta gaya kepemimpinan Kanselir Olaf Scholz juga berpengaruh terhadap arah kebijakan keamanan tersebut. Konsep *Zeitenwende* sering digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk menggambarkan perubahan kebijakan keamanan Jerman, terutama pada masa kepemimpinan Olaf Scholz. Namun, sebagian besar penelitian lebih banyak membahas perubahan kebijakan keamanan dan pertahanan di era Scholz, sementara pada masa Kanselir Angela Merkel masih sedikit diteliti untuk dibandingkan secara langsung. Peneliti menemukan kebaruan atau celah penelitian dari kumpulan data sebelumnya dengan memfokuskan penelitian dalam mendeskripsikan kebijakan pertahanan Jerman pada era Kanselir Angela Merkel dan Kanselir Olaf Scholz untuk menjelaskan perubahan arah kebijakan pertahanan Jerman dari pendekatan diplomasi dan kerja sama multilateral menuju kebijakan yang lebih aktif sebagai bentuk penguatan pertahanan setelah invasi Rusia ke Ukraina.

2.2 Kerangka Analisis

2.2.1 Konsep Kebijakan Pertahanan

Sejak awal tahun 1970-an, beberapa pendekatan yang berbeda dalam studi kebijakan pertahanan komparatif telah berkembang. Salah satu pendekatan adalah melakukan analisis komparatif dan kontras terhadap proses pengambilan keputusan dan pendekatan kebijakan pertahanan berbagai negara terhadap isu-isu pertahanan standar, seperti doktrin militer, postur kekuatan, proses pengambilan keputusan, akuisisi senjata, dan sejenisnya. Pendekatan lain berfokus pada anggaran pertahanan dengan asumsi bahwa kebijakan berkaitan dengan alokasi sumber daya yang terbatas, sehingga politik pertahanan tidak dapat dipisahkan dari persoalan distribusi dan prioritas belanja negara. Dalam istilah umum di Amerika Serikat, politik pertahanan dan pembentukan kebijakan mengacu pada proses-proses kebijakan internal yang sempit (domestik, intra-negara) yang mengatur fungsi-fungsi Departemen Pertahanan. Pertahanan sebagai ranah kebijakan ditandai oleh jenis politik tertentu yang secara khusus berfokus pada politik domestik terkait dengan penentuan struktur kekuatan militer (desain kekuatan, konsep organisasi, dan operasional), penelitian dan pengembangan (pengadaan sistem persenjataan), pengerahan personel, perlengkapan, serta pelatihan (Wilson & Forest, 2008). Selain itu, Frans Jones sebagai kontributor dalam penulisan buku "*Handbook of defence politics: international and comparative perspectives*" menyatakan bahwa kata "pertahanan" memiliki ruang lingkup yang terbatas pada aktivitas dan sumber daya yang ditujukan untuk menangkal pasukan penyerang, sehingga disebut juga pendekatan reaktif dalam upaya menolak serangan dari pihak luar (Wilson & Forest, 2008). Dengan demikian, istilah pertahanan terbatas pada aspek domestik mengenai pembentukan dan pengelolaan kekuatan militer, sementara penggunaan kekuatan militer dalam operasi eksternal atau strategi yang lebih luas termasuk dalam ranah kebijakan keamanan (*security policy*). Pertahanan tidak termasuk keseluruhan kebijakan keamanan, tetapi bagian spesifik yang berfokus pada pembangunan dan pengelolaan instrumen militer negara.

Pembuatan kebijakan pertahanan termasuk interaksi yang terus berubah antara proses politik dan perumusan kebijakan di seluruh dimensi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Untuk memahami keseluruhan dinamika digunakan kerangka analisis yang luas dengan tetap terorganisasi melalui tiga dimensi utama, yaitu domestik, regional, dan internasional serta interaksi yang muncul di antara ketiganya. Hasil kebijakan dari pertukaran ini tidak hanya menjadi produk dari satu interaksi tertentu, melainkan juga menjadi pemicu bagi rangkaian interaksi dan siklus selanjutnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan realitas politik pertahanan yang berlangsung di dunia nyata dan sering terabaikan oleh pendekatan tradisional, berfokus pada satu dimensi politik. Urusan pertahanan bagian dari proses multi-siklus berupa permainan kekuasaan, pengaruh, dan persaingan gagasan di panggung global yang terus berubah dengan negara dan aktor non-negara berinteraksi di tingkat domestik, regional, dan internasional (Wilson & Forest, 2008). Menentukan suatu perubahan dari kebijakan pertahanan berasal dari ranah domestik atau internasional dianggap kurang penting, hal utama adalah memahami dinamika nyata dari pertukaran politik-kebijakan serta dampak yang muncul dari interaksi tersebut dengan memperhatikan baik hasil akhir dan proses selama menciptakan kebijakan.

2.2.2 Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri suatu pemerintahan selalu mengalami perubahan berupa penyesuaian kecil ataupun perubahan nuansa. Herman (1990) menyatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan program berorientasi pada tujuan pemecahan masalah yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan dengan ditujukan kepada entitas diluar yurisdiksi politik negara tersebut. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri termasuk suatu rencana tindakan untuk menangani masalah atau mencapai tujuan tertentu yang melibatkan tindakan terhadap aktor eksternal. Program ini pada umumnya menetapkan kondisi serta instrumen kebijakan negara (*statecraft*) yang digunakan.

Dalam analisis perubahan kebijakan dilakukan secara sistematis dengan menelusuri elemen dari kebijakan yang mengalami transformasi.

Menurut Hermann, perubahan kebijakan luar negeri dapat terjadi secara bertahap dan memiliki tingkat kedalaman yang berbeda-beda, mulai dari perubahan yang paling sederhana hingga perubahan yang paling mendasar (Hermann, 1990). Pada tingkat yang paling rendah, perubahan kebijakan luar negeri mengambil bentuk perubahan penyesuaian (*adjustment changes*). Perubahan ini terjadi ketika negara meningkatkan atau mengurangi intensitas upaya kebijakan dengan mempersempit dan memperluas cakupan sasaran kebijakan tanpa mengubah tujuan maupun instrumen dasarnya. Dalam perubahan penyesuaian, tindakan, cara melakukannya, serta tujuan yang hendak dicapai tetap sama yang berubah terletak pada skala pelaksanaannya (Hermann, 1990). Perubahan jenis ini bersifat kuantitatif dan mencerminkan keyakinan pembuat kebijakan bahwa arah kebijakan yang ada masih tepat, meskipun membutuhkan koreksi operasional agar lebih efektif. Perubahan penyesuaian menunjukkan adanya proses pembelajaran terbatas, kegagalan kebijakan dipahami sebagai masalah implementasi bukan sebagai masalah desain kebijakan.

Tingkat perubahan berikutnya adalah perubahan program (*program changes*) yang bersifat lebih mendalam karena melibatkan perubahan kualitatif dalam metode kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam hal ini, negara tetap mempertahankan definisi masalah dan tujuan kebijakan, tetapi mengganti cara atau sarana yang dianggap tidak lagi efektif (Hermann, 1990). Misalnya, pergeseran dari penggunaan kekuatan militer ke diplomasi, atau dari tekanan ekonomi ke kerja sama institusional, mencerminkan perubahan program. Asumsi yang mendasari perubahan ini adalah bahwa kegagalan kebijakan disebabkan oleh ketidaktepatan alat, bukan oleh tujuan itu sendiri. Perubahan program ini menandai tingkat pembelajaran yang lebih substansial dibandingkan perubahan penyesuaian, karena pembuat kebijakan mulai mempertanyakan efektivitas instrumen kebijakan yang digunakan (Hermann, 1990).

Perubahan yang lebih mendasar terjadi pada tingkat perubahan masalah atau tujuan (*problem/goalchanges*). Pada tahap ini, pembuat kebijakan menilai ulang terhadap masalah yang ingin dipecahkan atau tujuan yang ingin dicapai.

Masalah yang sebelumnya dianggap penting dapat ditinggalkan, atau tujuan kebijakan digantikan oleh tujuan baru yang dinilai lebih realistis dengan kepentingan nasional (Hermann, 1990). Perubahan jenis ini mencerminkan asumsi bahwa kegagalan kebijakan bukan kegagalan instrumen, melainkan kegagalan dalam perumusan tujuan.

Tingkat perubahan yang paling ekstrem adalah perubahan orientasi internasional (*international orientation changes*). Perubahan ini tidak terbatas pada satu isu atau satu hubungan bilateral, melainkan mencakup pergeseran menyeluruh dalam peran, orientasi, dan pola keterlibatan negara dalam sistem internasional (Hermann, 1990). Dalam perubahan orientasi internasional, banyak kebijakan luar negeri berubah hampir berlangsung secara bersamaan karena negara mengadopsi pandangan baru mengenai posisinya di dunia internasional. Asumsi teoretis yang melekat pada jenis perubahan ini adalah bahwa negara mengalami krisis konseptual yang mendalam terkait identitas, peran global, atau strategi besarnya, sehingga diperlukan pengalihan arah kebijakan. Perubahan orientasi internasional relatif jarang terjadi dan biasanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar seperti perang besar, perubahan rezim, atau transformasi struktural dalam sistem internasional.

Untuk menjelaskan proses terjadinya perubahan tersebut, Hermann mengidentifikasi empat sumber utama perubahan kebijakan luar negeri, yaitu perubahan yang digerakkan oleh pemimpin (*leader driven*), advokasi birokrasi (*bureaucratic advocacy*), restrukturisasi domestik (*domestic restructuring*), dan guncangan eksternal (*external shock*). Perubahan yang digerakkan oleh pemimpin terjadi ketika seorang pembuat kebijakan berotoritas tinggi, posisi kepala pemerintahan secara aktif memaksakan visi baru mengenai arah kebijakan luar negeri. Asumsi yang mendasari sumber perubahan ini bahwa individu memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai agen perubahan, terutama ketika memiliki keyakinan kuat, kekuasaan politik, dan energi untuk mengatasi resistensi institusional (Hermann, 1990).

Selanjutnya, sumber advokasi birokrasi memandang perubahan kebijakan luar negeri sebagai hasil dari inisiatif kelompok-kelompok tertentu dalam aparatur negara. Birokrasi sering dipersepsikan sebagai kekuatan yang

resisten terhadap perubahan, pejabat tingkat menengah justru sering berada pada posisi yang lebih baik untuk mendeteksi sinyal kegagalan kebijakan (Hermann, 1990). Kelompok-kelompok yang berada dalam satu lembaga maupun lintas lembaga dapat bertindak sebagai penggerak perubahan apabila mereka memiliki akses yang memadai kepada pengambil keputusan tingkat atas. Sumber perubahan ini termasuk hasil dari dinamika organisasi dan persaingan antar-aktor dalam proses pengambilan keputusan.

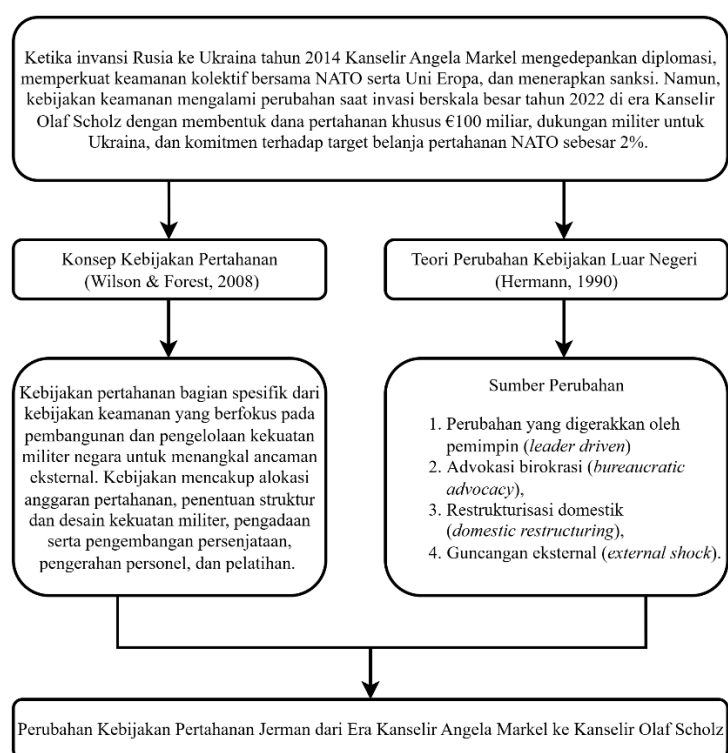
Sumber perubahan berikutnya, restrukturisasi domestik yang merujuk pada perubahan dalam komposisi, kepentingan, atau pandangan segmen-segmen masyarakat dan elite politik yang menopang legitimasi pemerintahan. Kebijakan luar negeri bergantung pada dukungan politik domestik, sehingga perubahan dalam struktur kekuasaan atau preferensi elite dapat memicu pengalihan arah kebijakan (Hermann, 1990). Dalam konteks ini, perubahan kebijakan luar negeri termasuk gambaran dari perubahan keseimbangan kekuatan politik domestik, baik akibat perubahan sosial, krisis legitimasi, maupun transformasi rezim (Hermann, 1990).

Sumber perubahan terakhir, yaitu guncangan eksternal. Sumber ini dihasilkan oleh peristiwa internasional yang bersifat dramatis, memiliki visibilitas tinggi, dan berdampak langsung terhadap negara yang bersangkutan. Berbeda dengan rangsangan eksternal yang rutin dan sering diabaikan, guncangan eksternal tidak dapat dengan mudah diserap oleh kebijakan yang ada dan memaksa pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan perubahan besar (Hermann, 1990). Guncangan eksternal juga dipahami sebagai bentuk umpan balik negatif yang kuat dengan memicu penyesuaian sistem kebijakan luar negeri untuk menghadapi perubahan lingkungan yang bersifat diskontinu.

Sumber-sumber perubahan tersebut jarang bekerja secara terisolasi. Perubahan kebijakan luar negeri biasanya hadir sebagai hasil dari interaksi antara berbagai sumber perubahan, misalnya ketika guncangan eksternal membuka ruang bagi inisiatif pemimpin atau memperkuat posisi kelompok advokasi birokrasi. Kesamaan asumsi yang mendasari berbagai pendekatan bahwa perubahan kebijakan luar negeri hampir selalu dipicu oleh persepsi kegagalan kebijakan yang ada. Informasi mengenai kegagalan, baik yang

bersifat aktual maupun potensial memasuki sistem pengambilan keputusan dan mendorong proses pembelajaran, konflik politik, serta restrukturisasi preferensi (Hermann, 1990). Akhirnya, perubahan kebijakan luar negeri hanya dapat diwujudkan melalui proses pengambilan keputusan pemerintah. Sumber-sumber perubahan bekerja melalui mekanisme institusional yang dapat menghambat atau justru memfasilitasi perubahan. Oleh karena itu, analisis teoretis perubahan kebijakan luar negeri mampu menjelaskan informasi tentang kegagalan kebijakan masuk ke dalam proses pengambilan keputusan serta dalam kondisi tersebut mampu menghasilkan keputusan eksplisit untuk mengalihkan arah kebijakan luar negeri negara.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran
Sumber : Diolah oleh Peneliti

Pada bagian kerangka pemikiran ini, peneliti akan menjelaskan isu dalam penelitian, yaitu perubahan kebijakan pertahanan Jerman dari era Kanselir Angela Merkel ke Kanselir Olaf Scholz. Ketika Rusia melakukan invasi pertama ke Ukraina pada tahun 2014, Kanselir Angela Merkel merespons

dengan kebijakan yang menekankan pendekatan diplomasi dan kerja sama multilateral dijalankan secara bertahap dan terkoordinasi melalui Uni Eropa, NATO, serta mitra transatlantik lainnya. Namun, ketika invasi kedua Rusia terjadi pada tahun 2022 dengan skala yang lebih besar memberi ancaman bagi keamanan Eropa, Kanselir Olaf Scholz memperkenalkan istilah *Zeitenwende* yang menandai perubahan orientasi kebijakan pertahanan Jerman. Perubahan ini terlihat dari pembentukan dana pertahanan khusus sebesar €100 miliar, dukungan militer untuk Ukraina, serta komitmen terhadap target belanja pertahanan NATO sebesar 2% dari PDB. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti akan mendeskripsikan kebijakan pertahanan di era dua pemerintahan kanselir menggunakan konsep kebijakan pertahanan. Selanjutnya, peneliti mengkaji perubahan kebijakan pertahanan Jerman menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri (Hermann, 1990) dengan menganalisis empat sumber perubahan mulai dari *leader driven*, *bureaucratic advocacy*, *domestic restructuring*, dan *external shock* dalam menjelaskan sumber yang lebih dominan menjadi penggerak perubahan. Kemudian, penelitian akan menganalisis posisi tingkat perubahan Jerman dalam membentuk kebijakan pertahanan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan melalui kontak yang intens dan berkepanjangan dengan partisipan dalam lingkungan alami (naturalistik) untuk menyelidiki kehidupan sehari-hari atau kehidupan luar biasa dari individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi (Miles dkk., 2014). Dalam pendekatan ini, peneliti berperan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, sistemik, mencakup berbagai aspek, dan terintegrasi mengenai konteks yang diteliti, termasuk tatanan sosialnya, cara kerjanya, serta aturan-aturan eksplisit dan implisit yang berlaku. Penggunaan instrumen yang distandarkan dalam pendekatan ini relatif sedikit yang disebabkan oleh peneliti itu sendiri berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Peneliti berupaya menangkap data mengenai persepsi partisipan dari sudut pandang internal melalui proses perhatian mendalam, pemahaman empatik, serta menanggukhan atau mengesampingkan prasangka terhadap topik yang dibahas (Miles dkk., 2014). Metode ini digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan pertahanan Jerman dari era Kanselir Angela Merkel ke Kanselir Olaf Scholz dengan menggunakan konsep kebijakan pertahanan dan teori perubahan kebijakan luar negeri sebagai landasan analisis. Melalui teori ini, peneliti dapat menganalisis sumber yang lebih dominan mendorong perubahan kebijakan pertahanan serta menjelaskan posisi tingkat perubahan.

3.2 Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan batasan dalam melakukan penelitian untuk menghindari objek penelitian yang meluas. Fokus peneliti menjelaskan perubahan kebijakan pertahanan Jerman dari era Kanselir Angela Merkel ke Kanselir Olaf Scholz tahun 2014–2024. Peneliti memilih tahun 2014 disebabkan adanya pemicu invasi pertama Rusia ke Ukraina era kepemimpinan Kanselir Angela Merkel sampai masa jabatannya berakhir tahun 2021 dan tahun 2024 mendekati periode akhir masa jabatan Kanselir Olaf Scholz Jerman yang kembali menghadapi ancaman keamanan akibat invasi berskala besar hingga menjadi perang Rusia-Ukraina sejak 2022. Dari rentang tahun tersebut, terjadi penyesuaian kebijakan pertahanan Jerman dalam merespon ancaman di Kawasan Eropa dengan komitmen menciptakan keamanan kolektif melalui kerja sama multilateral.

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dianalisis didasarkan pada observasi, wawancara, dokumen, dan artefak (Miles dkk., 2014). Menurut Craswell 2014 dokumen kualitatif dapat berupa dokumen publik, seperti surat kabar, notulen rapat, dan laporan resmi serta dokumen pribadi, misalnya jurnal, buku harian pribadi, surat, email (Creswell, 2014). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber sekunder yang relevan, antara lain:

1. Dokumen resmi pemerintahan Jerman, seperti *White Paper on German Security Policy and the Future of the Bundeswehr* (2006 dan 2016) dan *National Security Strategy* (2023).
2. Laporan lembaga internasional, seperti *The Military Balance* dari IISS (2006–2025), laporan SIPRI, serta dokumen resmi NATO.
3. Sumber daring, seperti web resmi pemerintah Jerman, web resmi NATO, web resmi Uni Eropa, dan artikel penelitian dari *database* kredibel, termasuk JSTOR, Springer Nature, Taylor & Francis, Cogitatio Press, Dergipark Akademik, ResearchGate, dan lain sebagainya.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses analisis dalam penelitian kualitatif yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, pemusatan, dan transformasi data dari berbagai sumber seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, atau dokumen agar menjadi lebih terarah dan bermakna (Miles dkk., 2014). Proses ini berlangsung terus-menerus sejak tahap perencanaan penelitian hingga penyusunan laporan akhir, termasuk saat menentukan kerangka konseptual, melakukan pengkodean, mengembangkan tema, dan menulis memo analitik. Tujuan utama kondensasi data adalah memperkuat dan menajamkan data tanpa menguranginya, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang jelas dan terverifikasi (Miles dkk., 2014). Kondensasi tidak selalu berarti mengubah data menjadi angka, tetapi bisa dilakukan melalui ringkasan, parafrase, atau pengelompokan ke dalam pola-pola yang lebih besar sesuai konteks penelitian.

Pada tahap kondensasi data, peneliti mulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber relevan, seperti pidato resmi para pemimpin Jerman, dokumen kebijakan luar negeri dan pertahanan (Buku putih pertahanan tahun 2006 dan 2016 serta *National Security Strategy* 2023), laporan lembaga maupun organisasi internasional seperti NATO, kajian literatur dari jurnal akademik dan berita internasional. Dari data tersebut, peneliti melakukan proses seleksi dengan memfokuskan hanya pada informasi yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan Jerman pada dua masa kepemimpinan tersebut. Selanjutnya, data disederhanakan melalui proses pengkodean tematik berdasarkan isu-isu utama, seperti anggaran pertahanan dan pengadaan alutsista, peran *bundeswehr*, serta kerja sama pertahanan untuk menganalisis pendekatan kebijakan pertahanan yang dilakukan era Kanselir Angela Merkel dan Kanselir Olaf Scholz. Peneliti juga

membuat catatan atau memo analitis untuk mendokumentasikan pemikiran awal, dugaan sementara, serta keterkaitan antardata. Tahapan ini untuk menyaring data yang luas menjadi bagian-bagian yang lebih terarah dan siap dianalisis lebih dalam.

2. Penyajian Data

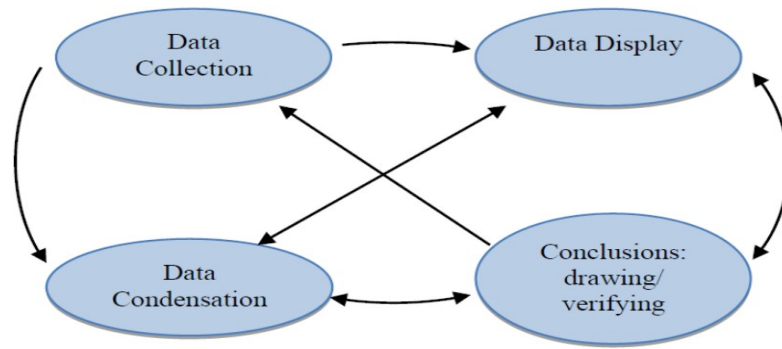
Tampilan data (*data display*) adalah proses menyusun dan menyajikan informasi secara terorganisasi dan ringkas agar peneliti dapat memahami pola, menarik kesimpulan, serta menentukan langkah analisis selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, tampilan data membantu mengatasi keterbatasan teks panjang yang sulit diolah karena terlalu besar, tidak terstruktur, dan dapat menimbulkan kesimpulan yang bias atau terburu-buru. Bentuk tampilan dapat berupa matriks, grafik, bagan, atau jaringan yang menyajikan data secara jelas dan mudah diakses. Seperti halnya kondensasi data, pembuatan tampilan juga termasuk bagian dari analisis karena melibatkan keputusan analitis dalam memilih, mengatur, dan menafsirkan data (Miles dkk., 2013). Oleh karena itu, tampilan data yang baik akan memperkuat kualitas analisis kualitatif dan membantu peneliti memahami secara mendalam yang sebenarnya ditunjukkan oleh data.

Pada penelitian ini, peneliti menampilkan data berbentuk tabel dan grafik untuk menjelaskan peningkatan anggaran pertahanan, kontribusi PDB Jerman terhadap keamanan kolektif NATO, dan pengadaan serta pengembangan sistem persenjataan. Dengan penyajian data, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola penting, melihat keterkaitan terhadap ancaman yang berlangsung, serta mengenali perubahan orientasi kebijakan secara lebih jelas. Penyajian mendukung analisis dengan menjadi alat refleksi untuk mengevaluasi kembali data yang dikumpulkan cukup atau tidak dalam mewakili fenomena yang diteliti.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Menarik dan memverifikasi kesimpulan sebagai tahap akhir dalam analisis data kualitatif yang berlangsung sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna data dengan mencari pola, hubungan sebab-akibat, dan penjelasan relevan yang secara bertahap membangun kesimpulan yang semakin jelas dan teruji (Miles dkk., 2013). Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan validitas temuan, baik melalui refleksi pribadi, pemeriksaan ulang data, diskusi dengan rekan sejawat, maupun replikasi hasil pada data lain (Miles dkk., 2013). Penarikan dan verifikasi kesimpulan tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan kondensasi dan tampilan data dalam siklus analisis yang terus berulang. Melalui proses ini, peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang kredibel, mendalam, bermakna, dan pemahaman tentang fenomena yang diteliti.

Pada tahap ini peneliti menafsirkan makna dari data yang telah dikondensasi dan ditampilkan. Kemudian, peneliti menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan dalam kebijakan pertahanan Jerman, dari pendekatan yang cenderung mengedepankan diplomasi dan memperkuat keamanan kolektif bersama NATO serta Uni Eropa menuju pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis kekuatan militer kolektif di era Scholz. Kesimpulan ini diverifikasi melalui sumber kredibel dengan membandingkan data dari dokumen resmi, laporan media, dan kajian ilmiah. Peneliti juga melakukan validasi melalui refleksi terhadap konteks politik dan keamanan regional untuk memastikan bahwa interpretasi yang diambil tidak bersifat sepihak. Kesimpulan ditarik dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang turut memengaruhi perubahan kebijakan, sehingga hasil analisis tetap terbuka terhadap revisi dan pengayaan lebih lanjut.



Gambar 3.1. Teknik Analisis Data Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2014 melalui aneksasi Krimea menjadi awal penyesuaian kebijakan pertahanan Jerman pada era Kanselir Angela Merkel. Sebelum peristiwa tersebut, kebijakan pertahanan terikat *culture of restraint* pasca perang dunia kedua yang membatasi penggunaan kekuatan militer dengan mengedepankan diplomasi dan kerja sama multilateral. *Bundeswehr* lebih diarahkan pada misi manajemen krisis internasional, operasi penjaga perdamaian, stabilisasi, dan kontribusi dalam kerangka NATO, Uni Eropa, serta PBB, bukan pada pembangunan kekuatan militer besar untuk menghadapi perang konvensional di Eropa. Setelah aneksasi Krimea, Jerman mulai melihat Rusia sebagai ancaman terhadap tatanan keamanan Eropa. Namun, respons kebijakan pertahanan pada masa Merkel masih bersifat terbatas dan bertahap. Jerman mendukung sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, terlibat dalam diplomasi melalui proses *Normandy Format* yang menghasilkan perjanjian *Minsk*, memperkuat kontribusi dalam NATO, mendukung *Readiness Action Plan*, serta berpartisipasi dalam *enhanced Forward Presence* di Lithuania. Kebijakan pertahanan Jerman pada era Kanselir Angela Merkel menunjukkan adanya adaptasi terhadap perubahan lingkungan keamanan, tetapi belum sampai pada perubahan strategis karena Jerman tetap mengutamakan diplomasi dan koordinasi multilateral bersama Uni Eropa dan NATO.

Perubahan yang lebih besar terjadi setelah invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 pada era Kanselir Olaf Scholz. Invasi ini menjadi guncangan eksternal yang jauh lebih kuat dibandingkan tahun 2014 yang memperlihatkan bahwa perang konvensional berskala besar di Eropa akan kembali terjadi dan pendekatan lama Jerman terhadap Rusia tidak lagi

memadai. Dalam merespons situasi tersebut, Scholz menyampaikan istilah *Zeitenwende* dalam pidatonya pada 27 Februari 2022 yang berarti titik balik kebijakan luar negeri dan pertahanan Jerman. Perubahan dari pendekatan pertahanan yang sebelumnya berorientasi pada manajemen krisis menuju fokus pada *deterrence* dan kesiapan perang intensitas tinggi. Kanselir Olaf Scholz mengumumkan pembentukan dana khusus pertahanan sebesar €100 miliar untuk modernisasi Bundeswehr, peningkatan anggaran pertahanan menuju target NATO sebesar 2% dari PDB, pengiriman senjata kepada Ukraina, pengadaan alutsista modern seperti F-35A, *Eurofighter*, CH-47F Chinook, Arrow 3, IRIS-T SLM, Patriot, penguatan sistem pertahanan udara melalui ESSI (*European Sky Shield Initiative*), dan restrukturisasi *Bundeswehr* agar lebih siap menjalankan pertahanan nasional dan pertahanan kolektif NATO diarahkan pada kemampuan bertempur atau *warfighting capability*. Jika pada era Kanselir Angela Merkel perubahan masih berupa adaptasi terbatas, maka pada era Scholz perubahan kebijakan pertahanan Jerman berkembang menjadi perubahan strategis terutama pada kekuatan militer yang bersiap untuk perang.

Berdasarkan teori perubahan kebijakan luar negeri Charles F. Hermann, perubahan kebijakan pertahanan Jerman dari era Merkel ke era Scholz terutama didorong oleh *external shock*, yaitu invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Rusia menyerang telah Ukraina dari berbagai arah dengan menargetkan kota-kota besar, infrastruktur strategis, pusat pemerintahan, dan wilayah sipil yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan Eropa. Sebagai negara besar dengan perekonomian tertinggi di kawasan, Jerman sebagai *guarantor of European*, yaitu aktor yang menjamin keamanan Eropa dan tidak bergantung kepada Amerika. Jerman harus menjadi penjamin keamanan Eropa yang diharapkan sekutunya, dengan ukuran, posisi geografis, kekuatan ekonomi, dan bobot politik Jerman membuat negara tersebut menjadi *leading power* termasuk dalam ranah militer.

Namun, dalam proses pembentukan kebijakan, faktor *leader driven change* juga memiliki peran penting. Pada era Kanselir Angela Merkel, kepemimpinan yang teliti, kooperatif, dan berorientasi pada konsensus membuat respons Jerman terhadap invasi 2014 lebih banyak diarahkan pada

diplomasi, sanksi, dan penguatan NATO secara terbatas. Era Kanselir Olaf Scholz, kepemimpinan Kanselir berperan dalam membingkai invasi Rusia sebagai titik balik historis yang menuntut perubahan besar dalam kebijakan pertahanan Jerman. Scholz menggunakan momentum krisis untuk mendorong kebijakan yang sebelumnya sulit diterima dalam tradisi politik Jerman, seperti pengiriman senjata ke wilayah konflik, peningkatan drastis anggaran pertahanan, dan modernisasi besar-besaran *Bundeswehr*. Untuk sumber *bureaucratic advocacy* dan *domestic restructuring* lebih bersifat pendukung. Kementerian Pertahanan dan Bundeswehr berperan dalam menerjemahkan ancaman Rusia ke dalam kebutuhan teknis seperti modernisasi alutsista, peningkatan kesiapan tempur, dan reformasi doktrin pertahanan. Sementara itu, restrukturisasi domestik terlihat dari meningkatnya dukungan parlemen dan elite politik terhadap dana khusus pertahanan, peningkatan anggaran, serta reorganisasi Bundeswehr.

Dengan demikian, perubahan kebijakan pertahanan Jerman dipicu oleh *external shock* dengan arah, bentuk, dan implementasi kebijakannya sangat dipengaruhi oleh peran pemimpin, terutama melalui Keputusan Kanselir Olaf Scholz dalam mendorong *Zeitenwende*. Kebijakan pertahanan Jerman pasca-*Zeitenwende* berada pada tingkat *program and goal changes*. Hal ini ditunjukkan melalui perubahan instrumen kebijakan dari diplomasi dan penolakan bantuan militer menjadi pengiriman senjata langsung kepada Ukraina, mulai dari senjata anti-tank, rudal Stinger, Gepard, hingga Leopard 2. Pada saat yang sama, tujuan kebijakan Jerman juga bergeser dari penghindaran eskalasi menuju dukungan aktif terhadap pertahanan Ukraina dan penguatan keamanan Eropa. Jerman mulai bergeser dari negara yang membatasi penggunaan kekuatan militer menuju aktor penjamin keamanan Eropa yang lebih aktif melalui peningkatan anggaran pertahanan, modernisasi *Bundeswehr*, penguatan *deterrence*, dan dukungan militer kepada Ukraina.

5.2 Saran

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi kebijakan *Zeitenwende* setelah masa pemerintahan Olaf Scholz,

terutama untuk melihat sejauh mana peningkatan anggaran pertahanan, modernisasi Bundeswehr, dan pengadaan alutsista benar-benar berhasil meningkatkan kesiapan militer Jerman. Selain itu, peneliti berikutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan kebijakan pertahanan Jerman dengan negara Eropa lain, seperti Prancis, Polandia, Inggris, atau negara-negara Baltik dalam merespons perang Rusia-Ukraina. Perbandingan ini dapat membantu menjelaskan apakah perubahan kebijakan pertahanan Jerman termasuk fenomena khusus Jerman atau bagian dari perubahan lebih luas dalam keamanan Eropa. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk lebih mendalami aspek industri pertahanan Jerman dan Eropa, terutama terkait peningkatan produksi senjata, kerja sama pertahanan Eropa, serta proyek-proyek seperti *European Sky Shield Initiative*, *Future Combat Air System* (FCAS), dan *Main Ground Combat System* (MGCS). Fokus ini dapat memperluas kajian karena perubahan pertahanan Jerman menyangkut kebijakan luar negeri dan militer yang berkaitan dengan kapasitas industri, teknologi, dan kemandirian strategis Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggestam, L., & Hyde-Price, A. (2020). Learning to Lead? Germany and the Leadership Paradox in EU Foreign Policy. *German Politics*, 29(1), 8–24. <https://doi.org/10.1080/09644008.2019.1601177>
- Ağralı, E. (2024). The Shift of Germany in Security and Defence Policies: An Analysis In Frame of Neoclassical Realism. *Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi*, 32–2(32–2), 143–169. <https://doi.org/10.29228/mjes.458>
- Allers, R. M. (2016). Are We Doing Enough? Change and Continuity in the German Approach to Crisis Management. *German Politics*, 25(4), 519–540. <https://doi.org/10.1080/09644008.2016.1174694>
- Auswärtiges Amt. (2014). *Policy statement by Federal Chancellor Angela Merkel on the situation in Ukraine*. German Federal Foreign Office. <https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/140314-merkel-ukraine-260760>
- Blumenau, B. (2022). Breaking with convention? *Zeitenwende* and the traditional pillars of German foreign policy. *International Affairs*, 98(6), 1895–1913. <https://doi.org/10.1093/ia/iiacl66>
- Bunde, T. (2025). *Zeitenwende* as a foreign policy identity crisis: Germany and the travails of adaptation after Russia's invasion of Ukraine. *The British Journal of Politics and International Relations*, 13691481241311568. <https://doi.org/10.1177/13691481241311568>
- Bundesministerin der Verteidigung. (2016). *Personalstrategie Der Bundeswehr*. Bundesministerin der Verteidigung. <https://www.bmvg.de/resource/blob/11270/62cd3f62196935559a1cb4228315fe17/c-18-07-17-download-personalstrategie-data.pdf>
- Bundesministerium der Verteidigung. (2014, Oktober 6). *Expertenbericht zu Rüstungsprojekten übergeben*. <https://www.bmvg.de/de/aktuelles/expertenbericht-zu-ruestungsprojekten-uebergeben-11650>
- Bundesministerium der Verteidigung. (2016, Januari 27). *Materielle Ausrüstung der Bundeswehr: Ministerin leitet Trendwende ein*. <https://www.bmvg.de/de/aktuelles/materielle-ausruestung-der-bundeswehr-11518>

- Bundesministerium der Verteidigung. (2018). *Die Konzeption der Bundeswehr Ausgewählte Grundlinien der Gesamtkonzeption*. <https://www.bundeswehr.de/resource/blob/26546/befaf450b146faa515e19328e659fa1e/20180731-broschuere-konzeption-der-bundeswehr-data.pdf>
- Bundesministerium der Verteidigung. (2021, Desember 30). *Der Organisationsbereich Cyber-und Informationsraum*. <https://www.bmvg.de/de/themen/cyber-sicherheit/cyber-verteidigung/cyber-abwehr/der-organisationsbereich-cyber-und-informationsraum-12038>
- Bundesministerium der Verteidigung. (2022a). *Ministerin: „Wir sorgen für eine voll einsatzbereite Bundeswehr“*. <https://www.bmvg.de/de/aktuelles/ministerin-wir-sorgen-fuer-voll-einsatzbereite-bundeswehr-5438596>
- Bundesministerium der Verteidigung. (2022b, Oktober 14). *European Sky Shield – die Initiative im Überblick*. <https://www.bmvg.de/de/aktuelles/european-sky-shield-die-initiative-im-ueberblick-5511066>
- Bundesministerium der Verteidigung. (2024). *Bundeswehr der Zeitenwende: Kriegstüchtig sein, um abschrecken zu können*. <https://www.bmvg.de/de/aktuelles/bundeswehr-der-zeitenwende-kriegstuechtig-sein-um-abzuschrecken-5765386>
- Bundesrechnungshof. (2025). *Need for action within the Bundeswehr Reorientation towards national and alliance defence requires a responsible use of funds and a course correction in terms of organisation and personnel* (hlm. 1–23). Bundesrechnungshof. https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/EN/Berichte/bundeswehr-en-volltext.pdf?_blob=publicationFile&v=4
- Bundesregierung. (2026). *Bilaterale Unterstützungsleistungen der Bundesregierung für die Ukraine und Menschen aus der Ukraine*. Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975228/2423058/b49e873efda519b0e6be3a12d1e306ee/2026-04-24-ukraine-unterstuetzung-data.pdf?download=1>
- Bundeswehr. (2019a, Juni 5). *Parliamentary Commissioner for The Armed Forces*. <https://www.bundeswehr.de/en/about-bundeswehr/identity-of-the-bundeswehr/leadership-development-and-civic-education/parliamentary-commissioner>
- Bundeswehr. (2019b, November 29). *Die Trendwende Personal ist erfolgreich!* Bundeswehr. <https://www.bundeswehr.de/de/organisation/personal/die-trendwende-personal-ist-erfolgreich--158546>
- Bundeswehr. (2024, September 17). *The Bundeswehr in Lithuania: Major Steps Towards the German Manoeuvre Brigade*. <https://www.bundeswehr.de/en/news/bundeswehr-lithuania>
- Bundeswehr. (2025, Juli 7). *The Organisation of The Bundeswehr*. <https://www.bundeswehr.de/en/organization>

- Bundeswehr. (2026, Januari 16). *Litauen: Die Bundeswehr in der Multinational Battlegroup Lithuania*. <https://www.bundeswehr.de/de/auftrag/einsaetze/missionen/anerkannte-missionen/efp-enhanced-forward-presence>
- Can, H., & Önsoy, M. (2023). Becoming an Army On Operations: Bundeswehr and The German Foreign Policy inn The Post-Cold War Period. *Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 106–139.
- Christine Lambrecht, C. (2022, September 15). *Policy Speech by Federal Minister of Defence on the National Security Strategy*. <https://www.bmvg.de/en/news/policy-speech-on-the-national-security-strategy-5497180>
- Congressional Research Service. (2010, Maret 16). *German Foreign and Security Policy: Trends and Transatlantic Implications*. <https://www.everycrsreport.com/reports/RL34199.html>
- Council of the European Union. (2015). *Timeline EU Sanctions Against Russia*. Consilium. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia/timeline-sanctions-against-russia/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Edition 4). SAGE.
- Deutscher Bundestag. (2021). *Übersicht zu Planstellen und Stärke der Bundeswehr*. Deutscher Bundestag. <https://www.bundestag.de/resource/blob/841962/6436a8021d80bba036979a2099d90f9d/WD-2-028-21-pdf.pdf>
- Deutscher Bundestag. (2022). *Deutscher Bundestag—Bundestag beschließt das Sondervermögen für die Bundeswehr*. Deutscher Bundestag. <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw22-de-sondervermoegen-897614>
- Die Bundesregierung. (2022). *Bundesregierung liefert Waffen aus Bundeswehr-Beständen an die Ukraine* (74; hlm. 1). Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundesregierung-liefert-waffen-aus-bundeswehr-bestaenden-an-die-ukraine-2008214.pdf>
- Die Bundesregierung. (2025). *Military support for Ukraine | Federal Government*. Die Bundesregierung informiert | Startseite. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv-bundesregierung/military-support-ukraine-2054992>
- Driedger, J. J. (2022). Inertia and Reactiveness in Germany's Russia Policy: From the 2021 Federal Election to the Invasion of Ukraine in 2022. *German Politics and Society*, 40(4), 135–151. <https://doi.org/10.3167/gps.2022.400407>
- European Council. (2014, Maret 20). *Extraordinary meeting of EU Heads of State or Government on Ukraine*. Consilium. <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/03/06/>

- European Pravda. (2023). *Poll: 52% of Germans Oppose Sending Taurus Missiles to Ukraine*. <https://www.eurointegration.com.ua/eng/news/2023/08/18/7167811/>
- Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action. (2022, Juni 21). *Federal Cabinet Approves Simplified Procurement Act-Faster Awarding of Contracts for the German Bundeswehr*. Joint Press Release. <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2022/06/20220621-federal-cabinet-approves-simplified-procurement-act.html>
- Federal Ministry of Defence. (2006). *White Paper 2006 on German Security Policy and the Future of the Bundeswehr*. Federal Ministry of Defence. <https://www.files.ethz.ch/isn/156941/Germany%202006%20white%20paper.pdf>
- Federal Ministry of Defence. (2023a). *Defence Policy Guidelines 2023*. Federal Ministry of Defence. <https://www.bmvg.de/resource/blob/5702804/7ee6065595ceb56b8bd13cbf44659582/defence-policy-guidelines-2023-data.pdf>
- Federal Ministry of Defence. (2023b, Juli 10). *German Military Commitment to Lithuania*. <https://www.bmvg.de/en/news/german-military-commitment-to-lithuania-5628002>
- Federal Ministry of Justice and Consumer Protection. (t.t.). *Basic Law for the Federal Republic of Germany*. Diambil 20 November 2025, dari https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html
- Frear, M., & Mazepus, H. (2021). Security, Civilisation and Modernisation: Continuity and Change in the Russian Foreign Policy Discourse. *Europe-Asia Studies*, 73(7), 1215–1235. <https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1843601>
- German Aid to Ukraine. (2026, Januari 6). *Germany's Military Aid in 2026*. <https://deaidua.org/news/2026/01/06/germanys-military-aid-in-2026/>
- German Bundestag. (2016). *Annual Report 2015 the Parliamentary Commissioner for the Armed Forces* (57; hlm. https://www.bundestag.de/resource/blob/697930/annual_report_2015_57th_report.pdf).
- German Bundestag. (2022). *Annual Report 2021 The Parliamentary Commissioner for the Armed Forces* (63). Deutscher Bundestag. https://www.bundestag.de/resource/blob/901614/annual_report_2021_63rd_report.pdf
- German Bundestag. (2023). *Annual Report 2022 the Parliamentary Commissioner for the Armed Forces* (64). German Bundestag. https://www.bundestag.de/resource/blob/949898/350e96fe32bce5146dbbf841d923c7eb/annual_report_2022_64th_report-data.pdf
- German Bundestag. (2024). *Annual Report 2023 the Parliamentary Commissioner for the Armed Forces* (65). German Bundestag. https://www.bundestag.de/resource/blob/1007444/11eaf88ccacd47a774d424eeee01f8e6/annual_report_2023_65th_report.pdf

- Giegerich, B., & Terhalle, M. (2021). *The Responsibility to Defend: Rethinking Germany's Strategic Culture*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003223870>
- Gotkowska, J. (2022, April 28). *German Arms Deliveries to Ukraine – the SPD's Controversial Course*. OSW Centre for Eastern Studies. <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2022-04-28/german-arms-deliveries-to-ukraine-spds-controversial-course>
- Graf, T. (2021). Trendradar 2021: Die öffentliche Meinung zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland 2010-2020. Dalam *Forschungsbericht / Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (u. Vorg.: Forschungsbericht / Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr ; Berichte = Reports / Sozialwissenschaftliches Institut)*; 129 (hlm. 622 KB, 1 Online-Ressource (35 Seiten) pages) [Application/pdf]. ZMSBw. <https://doi.org/10.48727/OPUS4-510>
- Hermann, C. F. (1990). Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 34(1), 3. <https://doi.org/10.2307/2600403>
- Hoffmann, I. (2024). *Zwei Jahre Krieg: Grünen-Anhänger unterstützen Waffenlieferungen an die Ukraine am Stärksten*. <https://www.bertelsmannstiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2024/februar/zwei-jahre-krieg-gruenen-anhaenger-unterstuetzen-waffenlieferungen-an-die-ukraine-am-staerksten>
- Hyde-Price, A. G. V. (2015). The “sleep-walking giant” awakes: Resetting German foreign and security policy. *European Security*, 24(4), 600–616. <https://doi.org/10.1080/09662839.2015.1065484>
- IISS. (2006). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2006*. Routledge.
- IISS. (2007). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2007*. Routledge.
- IISS. (2008). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2008*. Routledge.
- IISS. (2010). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2010*. Routledge.
- IISS. (2011). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2011*. Routledge.
- IISS. (2012). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2012*. Routledge.
- IISS. (2013). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2013*. Routledge.

- IISS. (2014). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2014*. Routledge.
- IISS. (2015). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2015*. Routledge.
- IISS. (2016). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2016*. Routledge.
- IISS. (2017). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2017*. Routledge.
- IISS. (2018). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2018*. Routledge.
- IISS. (2019). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2019*. Routledge.
- IISS. (2020). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2020*. Routledge.
- IISS. (2021). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2021*. Routledge.
- IISS. (2022). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2022*. Routledge.
- IISS. (2023). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2023*. Routledge.
- IISS. (2024). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2024*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003485834>
- IISS. (2025a). *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics 2025*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003630760>
- IISS. (2025b, Februari 12). *Global defence spending soars to new high*. IISS. <https://www.iiss.org/online-analysis/military-balance/2025/02/global-defence-spending-soars-to-new-high/>
- Jakniunaite, D. (2016). Changes in Security Policy and Perceptions of the Baltic States 2014 – 2016. *Journal on Baltic Security*, 2(2), 6–34. <https://doi.org/10.1515/jobs-2016-0041>
- Jamshidi, M., & Noori, F. (2017). The United States National Security Strategy under Bush and Obama: Continuity and Change. *World Sociopolitical Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.22059/wsps.2017.23675.1010>

- Karpavičiūtė, I. (2017). Securitization and Lithuania's National Security Change. *Lithuanian Foreign Policy Review*, 36(1), 9–33. <https://doi.org/10.1515/lfpr-2017-0005>
- Knight, B. (2023, Oktober 31). *German Military Must be "Fit for War."* Dw.Com. <https://www.dw.com/en/bundeswehr-must-be-fit-for-war-says-german-defense-minister/a-67268608>
- Kornelius, S. (2022). Angela Merkel in Power: How Influential was the Merkel Era? Dalam K. Larres, H. Moroff, & R. Wittlinger (Ed.), *The Oxford Handbook of German Politics* (hlm. 659–670). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198817307.013.37>
- Kříž, Z. (2018). German Military Transformation—The Never-Ending Quest for Appropriate Military Capacities. *Vojenské Rozhledy*, 27(3), 47–62. <https://doi.org/10.3849/2336-2995.27.2018.03.047-062>
- Lawrence, T., & White, G. (2018, Juli 1). *Germany's Defence Contribution: Is Berlin Underperforming?* International Centre for Defence and Security (ICDS). <https://icds.ee/en/germanys-defence-contribution-is-berlin-underperforming/>
- Löffmann, G., & Riemann, M. (2025). 'If I could turn back time': Temporal security narratives, ontological disruption, and Germany's *Zeitenwende*. *European Journal of International Security*, 1–19. <https://doi.org/10.1017/eis.2025.10008>
- Lovric, D. (2006). A Constitution Friendly to International Law: Germany and its Volkerrechtsfreundlichkeit. *Australian Year Book of International Law*. <https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/journals/AUYrBkIntLaw/2006/4.html>
- Manthey, von F. (2021). *Verteidigungshaushalt 2021*. Bundesministerium der Verteidigung. <https://www.bmvg.de/de/themen/verteidigungshaushalt/verteidigungshaushalt-2021>
- Manthey, F. (2023, November 10). *New Defence Policy Guidelines call for warfighting capability of the Bundeswehr*. Federal Ministry of Defence. <https://www.bmvg.de/en/news/new-defence-policy-guidelines-call-for-warfighting-5702800>
- Marinov, M. (2022). Dimensions of The Federal Republic of Germany Security and Defence Policy. A Chronological Perspective. *Bulletin of "Carol I" National Defence University*, 11(3), 16–23. <https://doi.org/10.53477/2284-9378-22-77>
- Merkel, A. (2014). *Policy Statement by Federal Chancellor Angela Merkel on the Situation in Ukraine*. Website of the Federal Government | Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/archive/policy-statement-by-federal-chancellor-angela-merkel-on-the-situation-in-ukraine-443796>

- Merkel, A. (2015). *Speech by Federal Chancellor Angela Merkel on the occasion of the 51st Munich Security Conference*. Website of the Federal Government | Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/archive/speech-by-federal-chancellor-angela-merkel-on-the-occasion-of-the-51st-munich-security-conference-400334>
- Merkel, A. (2019a). *Speech by Angela Merkel 2019*. <https://securityconference.org/en/publications/books/selected-key-speeches-volume-i/2010-2019/speech-angela-merkel-2019/>
- Merkel, A. (2019b, Februari 16). *Speech by Federal Chancellor Dr Angela Merkel on 16 February 2019 at the 55th Munich Security Conference*. Website of the Federal Government | Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/speech-by-federal-chancellor-dr-angela-merkel-on-16-february-2019-at-the-55th-munich-security-conference-1582318>
- Mello, P. A. (2024). Zeitenwende: German Foreign Policy Change in the Wake of Russia's War Against Ukraine. *Politics and Governance*, 12, 7346. <https://doi.org/10.17645/pag.7346>
- Merkel, A. (2014). *Policy Statement by Federal Chancellor Angela Merkel on the Situation in Ukraine*. Website of the Federal Government | Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/archive/policy-statement-by-federal-chancellor-angela-merkel-on-the-situation-in-ukraine-443796>
- Middelhoff, J., Schijvenaars, P., & De Landtsheer. (2017). Political Personality and Complex Decision-Making The Psychological Profile and Leadership Style of Angela Merkel, The World's Most Powerful Women. Dalam P. Bursens, C. de Landtsheer, L. Braeckmans, & B. Segaert (Ed.), *Complex political decision-making: Leadership, legitimacy and communication*. Routledge, Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781315453538>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Möckel, A. (2022, Februari 27). *Over EUR 100 Billion for the Bundeswehr and for Our Security*. <https://www.bmvg.de/en/news/over-eur-100-billion-for-the-bundeswehr-and-for-our-security-5362626>
- MSC. (2014). *Speeches at the Munich Security Conference 2014*. <https://securityconference.org/en/msc-2014/speeches/>
- Muttreja, I., & Blumenau, B. (2023, Mei 17). *How Russia's Invasion Changed German Foreign Policy*. <https://www.chathamhouse.org/2022/11/how-russia-as-invasion-changed-german-foreign-polic>
- Nabers, D., & Stengel, F. A. (2025). Crisis and Change in Post-Zeitenwende German Security Policy. *Politische Vierteljahresschrift*, 66(1), 19–44. <https://doi.org/10.1007/s11615-024-00584-5>

- NATO. (2014). *Wales Summit Declaration issued by NATO Heads of State and Government (2014)*. NATO. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
- NATO. (2016). *NATO's Readiness Action Plan*. NATO. https://www.nato.int/content/dam/nato/legacy-wcm/media_pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-rap-en.pdf
- NATO. (2017). *Secretary General Visits NATO Battlegroups Training Together in Lithuania*. North Atlantic Treaty Organization (NATO). <https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2017/06/20/secretary-general-visits-nato-battlegroups-training-together-in-lithuania>
- NATO. (2024). *Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2024)*. NATO. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_226465.htm
- NATO. (2025, September 19). *NATO's military presence in the east of the Alliance*. NATO. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_136388.htm
- Paterson, T. (2008, August 28). *Merkel Named Most Powerful Woman in World (Again)*. The Independent. <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/merkel-named-most-powerful-woman-in-world-again-911891.html>
- Rathbun, B. C. (2006). The Myth of German Pacifism. *German Politics & Society*, 24(2 (79)), 68–81.
- Reevell, A. B. C. (2025). *How the CIA and Ukrainian Intelligence Secretly Forged a Deep Partnership*. ABC News. Diambil 20 Mei 2026, dari <https://abcnews.com/International/cia-helped-rebuild-ukraine-intelligence-russia-invasion/story?id=116909361>
- Reuters. (2022). *Germany Offers Ukraine Helmets, Kyiv's Klitschko "Speechless."* Euronews. <https://www.euronews.com/2022/01/27/us-ukraine-crisis-germany>
- Scholz, O. (2022a). *Policy Statement by Olaf Scholz, Chancellor of the Federal Republic of Germany and Member of the German Bundestag, 27 February 2022 in Berlin*. Website of the Federal Government | Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/policy-statement-by-olaf-scholz-chancellor-of-the-federal-republic-of-germany-and-member-of-the-german-bundestag-27-february-2022-in-berlin-2008378>
- Scholz, O. (2022b, Desember 5). The Global Zeitenwende. *Foreign Affairs*, 102(1). <https://www.foreignaffairs.com/germany/olaf-scholz-global-zeitenwende-how-avoid-new-cold-war>
- Schreer, B. (2023). *Germany's New Defence Policy Guidelines*. IISS. <https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2023/11/germanys-new-defence-policy-guidelines/>

- SIPRI. (2025a). *Trends in World Military Expenditure, 2024*. SIPRI. https://www.sipri.org/sites/default/files/2025-04/2504_fs_milex_2024.pdf
- SIPRI. (2025b). *SIPRI Military Expenditure Database*. SIPRI Databases. <https://www.sipri.org/databases/milex>
- Simmons, K., Stokes, B., & Poushter, J. (2015). *NATO Publics Blame Russia for Ukrainian Crisis, but Reluctant to Provide Military Aid*. Pew Research. <https://www.pewresearch.org/global/2015/06/10/nato-publics-blame-russia-for-ukrainian-crisis-but-reluctant-to-provide-military-aid/>
- Speck, U. (2016). *Front Matter from The West's Response to the Ukraine Conflict: A Transatlantic Success Story*. German Marshall Fund of the United States. <http://www.jstor.org/stable/resrep19027.1>
- Spohr, K. (2023). After Merkel: Germany from Peace to War. *LSE Public Policy Review*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.31389/lseprr.77>
- Steinbrecher, M., & Koppenh le, H. (2024). Vom M nchener Konsens zur Zeitenwende? Dalam M. Elbe & A. D rfler-Dierken (Ed.), *Bundeswehr und Gesellschaft—Wahrnehmungen im Wandel* (hlm. 205–234). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-43359-8_11
- Tewes, H. (2002). *Germany, Civilian Power and the New Europe*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230289024>
- The Associated Press. (2023). *Scholz: Will Weigh Each Step Carefully on Ukraine Arms*. <https://apnews.com/article/politics-germany-government-olaf-scholz-cef30771264228a84dc5d2e76c598d6e>
- The Federal Government. (2015, Februari 6). *We are Doing Everything in Our Power*. Website of the Federal Government | Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/archive/-we-are-doing-everything-in-our-power--400304>
- The Federal Government. (2014, Maret 13). *Appeal to Russia's political reason*. Website of the Federal Government | Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/archive/appeal-to-russia-s-political-reason-443774>
- The Federal Government. (2015, Februari 2). *There Can be No Military Solution to The Conflict*. Website of the Federal Government | Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/archive/there-can-be-no-military-solution-to-the-conflict-439672>
- The Federal Government. (2016). *White Paper On German Security Policy And The Future Of The Bundeswehr*. The Federal Government. <https://www.bundeswehr.de/resource/blob/4800140/fe103a80d8576b2cd7a135a5a8a86dde/download-white-paper-2016-data.pdf>

- The Federal Government. (2023). *National Security Strategy: Robust. Resilient. Sustainable. Integrated Security for Germany*. The Federal Government. <https://www.nationalesicherheitsstrategie.de/National-Security-Strategy-EN.pdf>
- The Federal Government. (2026, Februari 12). *German aid for Ukraine*. Website of the Federal Government | Bundesregierung. <https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/germany-aid-for-ukraine-2192480>
- The White House. (2018). *Remarks by President Trump and NATO Secretary General Stoltenberg Before Expanded Bilateral Meeting*. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-nato-secretary-general-stoltenberg-expanded-bilateral-meeting/>
- Tian, H. (2023). The foreign policy transition of the German Scholz government in the context of the Russian-Ukrainian conflict and its causes. *Highlights in Business, Economics and Management*, 7, 216–222. <https://doi.org/10.54097/hbem.v7i.6951>
- Trebesch, C., Antezza, A., Bushnell, K., Frank, A., Franz, L., Kharitonov, I., Kumar, B., Rebinskaya, E., & Schramm, S. (2023). *The Ukraine Support Tracker: Which countries help Ukraine and how?* (2218). Kiel Institute for the World Economy. https://www.kielinstitut.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/fis-import/3ce24028-f1f9-4a1c-b456-2ef810d22188-KWP_2218_Trebesch_et_al_Ukraine_Support_Tracker.pdf?
- Wilson, I., & Forest, J. J. F. (Ed.). (2008). *Handbook of defence politics: International and comparative perspectives* (First issued in paperback). Routledge, Taylor and Francis.
- Wolff, G., & Kharitonov, I. (2025). *Kiel Military Procurement Tracker*. <https://www.kielinstitut.de/publications/kiel-military-procurement-tracker-17722/>
- Yakoviuk, I., Chyzhov, D., Karpachova, N., Hlushchenko, S., & Chaliuk, Y. (2020). National security policy in Ukraine: A change in the system of power relations of the modern world. *Revista San Gregorio*, 42, 224–235.